

**IMPLEMENTASI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA**

**(Studi Kasus: Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang Provinsi Sumatera Utara)**

Oleh:

Candra Suyatmiko

NIM 52151007

Program Studi

Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019

**IMPLEMENTASI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA**

**(Studi Kasus: Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan
Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Oleh:

Candra Suyatmiko

NIM 52151007



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Candra Suyatmiko**
NIM : 52151007
Tempat/Tgl. Lahir : Batu Lima, 12 Desember 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Gurilla Gang Byung Ali No. 8d Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS: DESA AMPLAS KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 14 November 2019

Yang membuat pernyataan

Candra Suyatmiko

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**IMPLEMENTASI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA (STUDI KASUS: DESA AMPLAS KECAMATAN PERCUT
SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA
UTARA)**

Oleh:

Candra Suyatmiko

NIM. 52151007

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 02 Mei 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Hendra Harmain, S.E, M.Pd
NIP. 19730510 199803 1 003

Rahmat Daim Hrp, M.Ak

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Hendra Harmain, S.E, M.Pd
NIP. 19730510 199803 1 003

Skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DESA AMPLAS KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA)** an. Candra Suyatmiko, NIM 52151007 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 17 Mei 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 26 Juni 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah
Sekretaris,

Ketua,

Hendra Harmain, S.E, M.Pd
NIP. 19730510 199803 1 003

Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIB. 1100000093

Anggota

Pembimbing I

Pembimbing II

1. (Hendra Harmain, S.E, M.Pd)
NIP.19730510 199803 1 003

2. Rahmat Daim Harahap, S.EI., M.Ak
NIP. 19900926 201803 1 001

Penguji I

Penguji II

3. Yusrizal, M.Si
NIP. 19750522 200901 1 006

4. Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIB. 1100000093

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA.
NIP. 19760507 200604 1 002

ABSTRAK

Skripsi berjudul **“Implementasi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Amplas Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)”** atas nama Candra Suyatmiko. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Bapak Hendra Harmain, S.E, M.Pd dan Pembimbing II oleh Bapak Rahmat Daim Harahap, S.EI,. M. Ak.

Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan program Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalur musyawarah. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran pelaksanaan dan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil deskripsi didapat melalui membandingkan Permendagri No. 113 & 114 Tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan sesuai RKP namun belum berjalan secara optimal sesuai Permendagri No. 113 & 114 Tahun 2014. Berdasarkan Permendagri No. 113 & 114 Tahun 2014, cara garis besar pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah akuntabel dan transparan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan. Didukung dengan masyarakat yang turut berpartisipasi aktif dalam musyawarah samapai dengan pengawasan pembangunan desa.

Kata Kunci: Implementasi, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayahnya penelitian dengan judul **“Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)”** dapat selesai.

Shalawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang sangat terang dengan agama Islam.

Penulis menyusun skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa ada bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Hj. Nurlaila, SE, MA selaku pembimbing akademik Jurusan Akuntansi Syariah yang telah membimbing selama proses penulisan proposal skripsi.
4. Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah serta pembimbing skripsi I yang telah membimbing selama proses penulisan skripsi.
5. Bapak Rahmat Daim Harahap, S.EI, M.Ak selaku pembimbing skripsi II yang telah membimbing selama proses penulisan skripsi.

6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
7. Ayah dan Ibu yang senantiasa telah mendoakan dan mendukung keputusan penulis dalam mencari ilmu.
8. Bapak Edi Purwanto selaku kepala desa dan seluruh staf desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang memberikan tempat penelitian dan selalu mendukung penulis dalam penyelesaian tugas akhir skripsi.
9. Amalia Rosintan, SE dan Wirdatun Nisa Skd, SE yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tugas akhir skripsi.
10. Bambang Suprpto, SP yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tugas akhir skripsi.
11. Partner terbaik "*Skripsweet*" Annisa Prastiwi dan Aisyah Rianda Gewa, yang sama-sama berjuang bersama penulis untuk menyelesaikan skripsi mengejar gelar sarjana (S1).
12. Ahmad Rais Siregar, Oky Maulana, Ilham, Nahal, Hamdan, Hakim, Rizki, Farid, Paidi, Kevin, Ayu Lestari, Ningsih yang membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian tugas akhir skripsi.
13. Alden, Khairunnisa, Dewi, Melin, Vina, Sari dan seluruh pengurus PII Kota Medan yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi.
14. Ayu Lestari, Yusmalina, Icha Aurelia, Nurul dan Tim KKN 11 2018 yang telah mendukung penyelesaian skripsi.
15. Intan Purnama Sari, Ade Alvianita, Nabila Humaira, Deby, Citra Nabila dan seluruh teman perjuangan di wadah KSEI UIE yang telahh memberikan semangat dan mendukung penulis dalam penyelesaian tugas akhir skripsi.
16. Teman-teman Akuntansi Syariah-A stambuk 2015 yang masih setia dan selalu memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

17. Juanda, Abdillah, Tjahyo, Ayu Riski, Nadia, Anum, Intan dan seluruh Alumni 2015 SMAN 3 Kisaran kelas XII IPA 1.
18. Fitria Panjaitan, Indi dan Niko atas dukungan penulisan tugas akhir skripsi.
19. Seluruh Pengurus dan Kader IKMA yang telah mendoakan sehingga selesainya tugas akhir skripsi.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan. 02 Mei 2019

Penulis

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah ALA-LC ROMANIZATION tables yaitu sebagai berikut:

A. Konsonan

Initial	Romanization	Initial	Romanization
ا	Omit	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ت	T	ظ	ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	gh
ح	H	ف	f
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	Dh	ل	l
ر	R	م	m
ز	Z	ن	n
س	S	هـ	h
ش	Sh	و	w
ص	Ṣ	ي	y

B. Vokal

1. Vokal Tunngal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fatḥah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ ... ي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
◌َ ... و	Fatḥah dan wau	Au	A da W

Contoh:

حسني: Ḥusain

حول: Ḥaul

C. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ	Fatḥah dan alif	ā	a dan garis di atas
◌ِ - ي	Kasrah dan ya	ī	I dan gari di atas
◌ُ - و	Ḍamah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi ta' marbūṭah (ة) di akhir kata, bila dimatikan ditulis h.

Contoh:

مرأة: mar'ah

مدرسة: madrasah

(ketentuan ini tidak digunakan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafadz aslinya)

E. Shiddah

Shiddah/Tashdīd di transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf bershaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā شَوَّال : Shawwāl

F. Kata Sandang Alif + Lām

Apabila diikuti dengan huruf qamariyah, ditulis al.

Contoh: الْقَلَم : al-qalam

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAKSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
<u>BAB I PENDAHULUAN.....</u>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<u>BAB II LANDASAN TEORI.....</u>	7
A. Konsep Implementasi	7
1. Pengertian Implementasi	7
2. Faktor-Faktor Implementasi	8
B. Akuntabilitas.....	9
1. Akuntabilitas Publik.....	9
2. Akuntabilitas Dalam Akuntansi Syariah.....	13
C. Defenisi Desa	17

D.Pendapatan Dan Belanja Desa	19
E.Alokasi Dana Desa	29
F.Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	35
1. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	35
2.Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	41
3 .Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	41
4.Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	41
4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa	41
4. Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	42
G.Kajian Terdahulu	45
H.Kerangka Konsep.....	49
<u>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</u>	50
A. Pendekatan Penelitian	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
C. Subjek Penelitian	51
D. Teknik Dan Intrumen Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data.....	53
<u>BAB IV PEMBAHASAN.....</u>	54
A. Gambaran Umum.....	54
1. Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang	54

2. Gambaran Umum Kecamatan Percut Sei Tuan.....	54
3. Gambaran Umum Desa Amplas	55
B. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	63
C. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	66
1. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	67
2. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	69
3. Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	71
4. Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	71
5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa	72
4. Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	72
BAB V PENUTUP	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.....	19
2. Perbedaan APBN dan APBD.....	34
3. Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	36
4. Kajian Terdahulu.....	45
5. Letak Demografi.....	56
6. Jumlah Penduduk.....	57
7. Jenis Pekerjaan.....	57
8. Bidang Pertanian dan Perikanan.....	58
9. Bidang Peternakan.....	58
10. Kelompok Penduduk Menurut Pendidikan.....	59
11. Lembaga Pendidikan.....	59
12. Kesehatan.....	60
13. Data Keagamaan.....	61
14. Implementasi Permendagri No. 113 & 114 Tahun 2014.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Kerangka Konsep.....	49
2. Struktur Pemerintahan Desa Amplas.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Surat Penelitian.....	79
2. Daftar Pedoman Wawancara.....	80
3. Hasil Wawancara.....	82
4. Dokumentasi Saat Wawancara.....	98
5. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2018.....	104
6. Dokumen APBDesa 2018.....	107
7. Rencana Anggaran Biaya 2018.....	111
8. Dokumen Rekening Koran Desa 2018.....	118
9. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa 2018.....	124
10. Lampiran Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 2018.....	127
11. Lampiran Kekayaan Milik Desa 2018.....	136
12. Daftar Hadir.....	138
13. Daftar Riwayat Hidup.....	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demikian kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah. Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Sejak diluncurkannya program Dana Desa oleh pemerintah guna untuk pembangunan desa, perkembangan dana desa semakin pesat dengan pengalokasian dana desa yang cukup besar dilihat dari jumlah alokasi dana desa setiap tahunnya. Pada tahun 2016 alokasi dana desa di desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang sebesar Rp.375.496.000, Tahun 2017 alokasi dana desa sebesar Rp.364.192.000 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 419.925.000. Menurut Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

¹ Undang-Undang No Pemerintah Daerah. 32 Tahun 2004 Tentang.

² Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Desa sebagai pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Pembangunan desa memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.³ Dalam pembangunan desa masyarakat harus dilibatkan dengan cara bergotong royong dan kebersamaan ini sebagai wujud pengamalan pancasila. Menurut PP RI No. 60 tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Dana Desa dikelola oleh pemerintah desa yang disalurkan ke masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat.⁵ Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang pengelolaan keuangan desa didalam pasal 18 meyakini bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten /kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.⁶ Menurut pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif dari semua lapisan.⁷ Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur Undang-Undang diatas tidak dijalankan. Pemberian dan implementasi ADD

³ Arista widiyanti,” *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa*”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, h. 2.

⁴ Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

⁵ *Ibid*

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁷ Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 24.

kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.⁸

Prinsip akuntabilitas dimulai dari perencanaan, pelaksanaan atau pengelolaan dan pertanggung-jawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*).⁹

Menurut Ayu Lomang dalam Lisa Nasehatun Nafidah, Nur Annisa menjelaskan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang meminta pertanggung-jawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggung-jawabkan).¹⁰ Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Lisa Nasehatun Nafidah, Nur Annisa) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung-jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung-jawaban yang dimaksud adalah masalah finansial Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan

⁸ Arista Widiyanti,” *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa*”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, h. 7.

⁹ *Ibid.*, h. 6.

¹⁰ Lina Nasehatun Nafidah, Nur Annisa. “ *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*” dalam jurnal *Ilmu Akuntansi*, Vol. 10 (02), Oktober 2017, h. 273-288.

Dana Desa (DD) termasuk komponen didalamnya.¹¹ Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Selain itu ADD ini diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh aparat desa dengan melibatkan masyarakat. ADD sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiyai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹²

Dalam beberapa situasi, penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapatkan bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.¹³ Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, diatur dalam Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang desa.¹⁴ Salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 pasal 4, yaitu membentuk pemerintah desa yang professional, efesien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.¹⁵ Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari

¹¹ *Ibid*

¹² Masiyah Kholmi. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa” dalam jurnal *Ekonomika Bisnis* , Vol. 07 N0. 02, Juli 2016, h. 143-152.

¹³ Masiyah Kholmi. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa” dalam jurnal *Ekonomika Bisnis* , Vol. 07 N0. 02, Juli 2016, h. 143-152.

¹⁴ Undang-undang RI No. 6 Tahun Tentang Desa.

¹⁵ *Ibid*.

kuat lemahnya partisipasi masyarakat.¹⁶ Fenomena yang terjadi di Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan adalah di desa tersebut ada lokasi jalan yang masih rusak sehingga ketika hujan jalan akan susah untuk dilewati. Melihat kejadian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Amplas. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas peneliti mengangkat judul tentang **“Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 di desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang sudah berjalan optimal?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 di Desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 di desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan serta mengoptimalkan lagi implementasi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

¹⁶ Masiyah Kholmi. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa” dalam jurnal *Ekonomika Bisnis* , Vol. 07 N0. 02, Juli 2016, h. 143-152.

2. Bagi penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan dan salah satu acuan peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian tentang pengelolaan ADD.

3. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pandangan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawasi dalam pelaksanaan ADD.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*publik policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimana pun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan (Widodo dalam jurnal Annivelorita).¹⁷ Pemahaman lebih lanjut tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lineberry (dalam jurnal Annivelorita) yang memberi pernyataan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak actual. Studi implementasi adalah studi perubahan, bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik, bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain, apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda (Jenkins dalam Wayne Person).¹⁸

Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari kebijakan itu. Disamping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji

¹⁷ Annivelorita, “ *Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan*”, dalam jurnal *Administrasi Negara*, Vol. 3 (5), 2015, h. 1712-1726.

¹⁸ Wayne Person, *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisi Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, cet 6, 2017), h. 463.

faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.¹⁹

2. Faktor-Faktor Implementasi

Model Edward III (dalam Annivelorita) mengajukan empat faktor atau variable yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor antara lain meliputi:²⁰

- a. Faktor Komunikasi; diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunika. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun kebijakan tujuan itu.
- b. Faktor Sumber Daya; meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadangan lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsistensi implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkaut dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

- menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung serta yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan maka hal yang harus dilakukan meningkatkan *skill*/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.
- c. Faktor Disposisi; merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
 - d. Struktur Birokrasi; keberhasilan implementasi kebijakan kompleks, perlu adanya kerja sama yang baik dari banyak orang. Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

B. Akuntabilitas

1. Akuntabilitas Publik

Asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.²¹ Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.²² Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*participal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²³

Menurut Mardiasmo Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu:²⁴

a. Akuntabilitas verikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Turner and Hulme dalam Mardiasmo, Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sector publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertical (*vertical accountability*). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

²³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, cet 4, 2009), h. 20

²⁴ *Ibid*, h. 21.

laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.²⁵

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellywood dalam Mardiasmo menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:²⁶

a. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, h. 21-22.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:²⁷

- a. Prinsip Transparansi atau keterbukaan, transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
- b. Prinsip Akuntabilitas, akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.
- c. Prinsip *value for money*, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisien dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan

²⁷ Mardiasmo, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2002), h. 105.

bahwa penggunaan anggaran tersebut mencapai target atau kepentingan masyarakat.

Keberhasilan akuntabilitas ADD dipengaruhi oleh isi kebijakan pemerintah desa dan konteks implementasinya. Namun dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan untuk setiap kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan implementasi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan kepatuhan pemerintah untuk melaksanakan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Akuntabilitas Dalam Akuntansi Syariah

Menurut Triyuwono dalam Aji Dedi Mulawarman, akuntabilitas merupakan spirit (ualitas) akuntansi syariah.²⁸ Konsep akuntabilitas sangat terkait dengan tradisi islam tentang tuhan, manusia dan alam semesta. Dalam tradisi islam , manusia adalah *khalifahtullah fil ardb* (wakil Allah di bumi) dengan misi khusus menyebarkan rahmat bagi seluruh alam sebagai amanah untuk mengelola bumi berdasarkan keinginan tuhan. Artinya, lanjut Triyuwono dalam Aji Dedi Mulawarman manusia berkewajiban mengelola bumi berdasarkan etika syariah, konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan kepada tuhan. Akuntabilitas seperti disebut Triyuwono dalam Aji Dedi Mulawarman sebagai premis utama dari akuntabilitas, yaitu akuntabilitas vertikal. Namun harus diakui bahwa tugas manusia adalah tugas yang membumi, yang dalam konteks mikro dapat diartikan sebuah entitas bisnis telah melakukan kontrak sosial dengan masyarakat dan alam.²⁹ Dalam konsep ini bahwa seseorang yang diberikan amanah atau jabatan di dunia ini harus dipertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukan, di pertanggungjawabkan dihadapan manusia selaku pimpinan maupun masyarakat

²⁸ Aji Dedi Mulawarman, *Akuntansi Syariah Teori Konsep dan Laporan Keuangan* (Jakarta: E Publishing Company, 2009), h. 115.

²⁹ *Ibid.*

dan di pertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT sesuai amanah yang diberikan.

Prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu:³⁰

a. Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Prinsip petanggungjawaban (*accountability*), merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah SWT untuk menjalankan fungsi kekhalifahan dimuka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah.

b. Prinsip Keadilan

Dalam firman Allah SWT *Q.S Al-Baqarah: 282*.³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْتَقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

³⁰ Muammar Khaddafi, et. al, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Didalam Akuntansi* (Medan: Penerbit Madenatera, 2016), h. 15.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashihan Al-Quran* (Bandung: Al-Hambra, 2014), h. 48.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282)

Menurut penafsiran Al-Quran surat *Al-Baqarah*: 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan inilah *inheren* yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia pada dasarnya memiliki

kapasitas dan energy untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surah *Al-Baqarah*, dilakukan oleh setiap instansi harus dicatat dengan benar tanpa memihak.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan.

Pada hakikatnya apa yang ada dimuka bumi ini adalah milik Allah SWT yang harus di kelola manusia sebagai *khalifah*. Kedudukan manusia sebagai *khalifah* akan terwujud secara maksimal jika ditunjang dua faktor .

- a. Kualitas manusia, yang berkenaan dengan keterampilan dan keahlian dalam bidang yang ditekuninya.
- b. Kepribadian mandiri yang dikendalikan oleh iman. Kedudukan iman ini sangat menentukan keberhasilan dalam melakukan pendakian menjadi seorang yang beruntung di dunia dan akhirat dalam menunaikan tugas *kekhilafahannya*.

Allah SWT berfirman *Q.S Al-Baqarah* (2): 30.³²

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (*QS Al Baqarah : 30*)

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawab utama.

C. Defenisi Desa

Menurut Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³ Desa sebagai pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Pembangunan

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashihan Al-Quran* (Bandung: Al-Hambra, 2014), h. 6.

³³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

desa memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.³⁴ Dalam pembangunan desa masyarakat harus dilibatkan dengan cara bergotong royong dan kebersamaan ini sebagai wujud pengamalan Pancasila yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri No. 113 Tahun 2014)³⁵. Pemerintah desa berfungsi sebagai subsistem dari sistem administrasi pemerintahan Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri (Hehamahua dalam Riska Apriliana).³⁶

Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan desa diharapkan terjadi dimasa depan (visi desa). Menurut Permendesa No. 22 Tahun 2016 Tipologi desa dibagi menjadi tiga yaitu Desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, dan desa maju atau mandiri.³⁷

Desa sangat tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

³⁴ Arista Widiyanti, "Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa", Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, h. 2.

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

³⁶ Riska Apriliana, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance", Skripsi IAIN Surakarta. 2017, h. 35.

³⁷ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Desa berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Desa maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa dan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan

D. Pendapatan dan Belanja Desa

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah dibandingkan dengan anggarannya masing-masing selama periode tertentu.³⁸

Tabel 2.1

Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa

Semester Akhir Tahun

Pemerintah Desa.....

Tahun Anggaran.....

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Lebih/ Kurang (Rp.)	Ket.
1	2	3			4
	PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				

³⁸ Eka Nurmala Sari, *Akuntansi Sektor Publik*, (Medan: Perdana Publishing, cet 2, 2017), h. 189.

1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				

2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dfan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik,dasn Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				

2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				

2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				

3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

.....

TTD

(.....)

Permendagri nomor 113 tahun 2014 Bab 1 ketentuan umum menyebutkan bahwa Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa, APBDesa, terdiri atas:³⁹

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- 1) Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa
- 2) Hasil asset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- 4) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa.

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- 1) Dana Desa.
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah kabupaten/Kota Retribusi Daerah.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD).
- 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.
- 5) Bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota

c. Pendapatan Lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan undang-undang dibidang hibah dan bantuan sosial.⁴⁰
- 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok:

⁴⁰ Soaradi, *Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 20.

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

2) Belanja Barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud antara lain: alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makan dan minuman rapat, pakaian dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga/rukun warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3) Belanja Modal

- a) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.
- b) Pelaksanaan pembangunan desa.
- c) Pembinaan masyarakat desa.
- d) Belanja tak terduga.

Permendagri nomor 20 tahun 2018 Bab III ketentuan umum menyebutkan bahwa Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa, APBDesa, terdiri atas:⁴¹

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

⁴¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- 1) Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa
- 2) Hasil asset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- 4) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa.

b. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- 1) Dana Desa.
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah kabupaten/Kota Retribusi Daerah.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD).
- 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.
- 5) Bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota

c. Pendapatan Lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama desa.
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah

disesuaikan dengan perundang-undangan dibidang hibah dan bantuan sosial.⁴²

- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggran berjalan.
- 5) Bunga bank.
- 6) Pendapatan lain desa yang sah.

3. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Jenis belanja desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD.

b. Belanja Barang/Jasa

- 1) Operasional pemerintah desa.
- 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana.
- 3) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis.
- 4) Operasional BPD.
- 5) Isentif rukun tetangga/rukun warga.
- 6) Pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat.

c. Belanja Modal

⁴² Soaradi, *Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 20.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah asset. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Pada kegiatan ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 2) Tidak diharapkan terjadi berulang.
- 3) Berada di luar kendali pemerintah desa.

E. Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang pengelolaan keuangan desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten /kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.⁴³ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.⁴⁴

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD-nya yang kurang mencukupi untuk anggaran belanjanya.⁴⁵

⁴³ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁴⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁴⁵ Deddi Nordiawan, et. al., *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Salemba Empat, cet 2, 2007), h. 48.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Latar belakang lain adanya transfer dana dari pusat ke daerah ini antara lain untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal (antara pusat dan daerah), mengatasi ketimpangan horizontal muncul akibat tidak seimbangnya kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan fiskalnya. Dengan kata lain, kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli tidak mampu menutup kebutuhan belanjanya.⁴⁶ Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa seperti:⁴⁷

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - a. Penetapan dan penegasan batas desa.
 - b. Pendataan desa.
 - c. Penyusunan tata ruang desa.
 - d. Penyelenggaraan musyawarah desa.
 - e. Pengelolaan informasi desa.
 - f. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa.
 - g. Penyelenggaraan kerja sama antar desa.
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa.
 - i. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - a. Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:
 - 1) Tambatan perahu.
 - 2) Jalan permukiman.
 - 3) Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
 - 4) Pembangkit listrik tenaga mikrohidra.
 - 5) Lingkungan permukiman masyarakat desa.
 - 6) Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - 1) Air bersih berskala desa.
 - 2) Sanitasi lingkungan.
 - 3) Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu.
 - 4) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) Taman bacaan masyarakat.
 - 2) Pendidikan anak usia dini.
 - 3) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 - 4) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni.
 - 5) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - 1) Pasar desa.
 - 2) Pembentukan dan pembangunan BUMdes
 - 3) Penguatan permodalan BUMdes
 - 4) Pembibitan tanaman pangan.
 - 5) Penggilingan padi.
 - 6) Lumbung desa.
 - 7) Pembukaan lahan pertanian.
 - 8) Pengelolaan usaha hutan desa.
 - 9) Kolam ikan dan pembenihan ikan.
 - 10) Tambak garam.
 - 11) Kandang ternak.
 - 12) Instalasi biogas.
 - 13) Mesin pakan ternak.
 - 14) Kapal penangkapan ikan.
 - 15) Cold storage (gudang pendingin).

- 16) Tempat pelelangan ikan.
- 17) Saran dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) Penghijauan.
 - 2) Pembuatan terasering.
 - 3) Pemeliharaan hutan bakau.
 - 4) Perlindungan mata air.
 - 5) Pembersihan daerah aliran sungai.
 - 6) Perlindungan terumbu karang.
 - 7) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama.
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.
 - e. Pembinaan lembaga adat.
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
 - g. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna.
 - c. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa.
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1) Kader pemberdayaan masyarakat desa.
 - 2) Kelompok usaha ekonomi produktif.
 - 3) Kelompok perempuan.
 - 4) Kelompok tani.
 - 5) Kelompok nelayan.
 - 6) Kelompok pengrajin.
 - 7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
 - 8) Kelompok pemuda.

9) Kelompok lain sesuai kondisi desa.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa seperti:⁴⁸

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa.
 - b. Sarana dan prasarana pemerintah desa.
 - c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
 - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
 - e. Pertanahan.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - a. Pendidikan.
 - b. Kesehatan.
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - d. Kawasan permukiman
 - e. Kehutanan dan lingkungan hidup.
 - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika.
 - g. Energi dan sumber daya mineral.
 - h. Pariwisata.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
 - b. Kebudayaan dan keagamaan.
 - c. Kepemudaan dan olahraga.
 - d. Kelembagaan masyarakat.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. Kelautan dan perikanan.
 - c. Pertanian dan peternakan.
 - d. Peningkatan kapasitas aparatur desa.
 - e. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.

⁴⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- f. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
 - g. Dukungan penanaman modal.
 - h. Perdagangan dan perindustrian.
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.
- a. Penanggulangan bencana.
 - b. Keadaan darurat.
 - c. Keadaan mendesak.

TABEL 2.2
Perbedaan APBD dan APBN

APBN	APBD
1. Penerimaan dalam negeri dan hibah a. Pendapatan pajak b. Pendapatan bukan pajak/SDA	1. Penerimaan daerah a. PAD b. Dana Perimbangan (Bagi hasil, DAU, dan DAK) c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Belanja Negara a. Belanja pusat b. Belanja daerah (Bagi hasil, DAU, dan DAK)	2. Belanja Daerah a. Rutin b. Pembangunan
3. Keseimbangan Primer	3. Surplus/Defisit
4. Surplus/Defisit	
5. Pembiayaan a. Dalam Negeri b. Luar Megeri	4. Pembiayaan

Dana perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Jumlah dana ditetapkan tahunnya dari APBN. Dana alokasi umum yang dibagikan daerah berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari anggaran rutin dalam APBN.⁴⁹ Dana ini dialokasikan 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota. Dana alokasi khusus juga berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiyai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Sebagai contoh dari kebutuhan khusus ini adalah kebutuhan kawasan transmigrasi yang tidak sama dengan kebutuhan di daerah lain, pembangunan jalan dikawasan terpencil, pembangunan saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer.⁵⁰

F. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 35, 37, 38, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa.⁵¹

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan memerlukan sumber daya yang berharga dalam peneglolaan Alokasi Dana Desa untuk mencapai hasil. Hasil dari suatu proses perencanaan adalah pendefenisian arah dan aktivitas Alokasi Dana Desa, dimana tahap ini membutuhkan keberanian dalam mengambol keputusan. Meskipun sifat dasar suatu proses sangat signifikan, namun manfaat perencanaan jauh lebih besar dibandingkan kesulitannya. Manfaat yang didapatkan dari proses perencanaan bersifat aktual, yaitu terwujud dokumen perencanaan.⁵²

⁴⁹ M. Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2002), h. 43.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁵² Indra Bastian, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), h. 45.

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

TABEL 2.3
FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....

Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Keterangan
1				2	3	
				PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)		
1				PENDAPATAN		
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		

1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan BPD		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda POS		
				- Pakaian Dinas dan Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik, dan Telepon		

				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Pengadaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		

				- Honor		
				- dst..... .		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan..... ...		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		

2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Penatausahaan Alokasi Dana Desa
 - a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
 - b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - d. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Pelaporan Alokasi Dana Desa
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - i. Laporan semester pertama
 - ii. Laporan semester akhir tahun.
 - b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
 - c. Laporan realisasi pelaksana APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.
 - d. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya
5. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
 - a. Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - c. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
 - d. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - 1) Format laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
 - 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
6. Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa
- a. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten/kota kepada desa.
 - b. Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pasal 31, 32, 43, 67, 68. 70 dan 74.⁵³

- 1. Perencanaan Alokasi Dana Desa
 - a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

⁵³ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- b. Sekretaris desa megoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/walikota setiap tahun.
 - c. Materi muatan bupati/walikota sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat:
 - 1) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKP Desa.
 - 2) Prinsip penyusunan APBDesa.
 - 3) Teknis penyusunan APBdesa
 - 4) Hal khusus lainnya.
 - d. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
 - e. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
 - f. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagai mana dimaksud disampaikan kepala desa kepada BPD dalam musyawarah BPD.
 - g. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud disepakati bersama paling lambat bulan Oktober berjalan.
 - h. Dalam hal BPD tidak menyepakati rencana peraturan desa tentang APBDesa yang disampaikan kepala desa, pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
 - i. Kepala desa menetapkan peraturan desa sebagai dasar pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud.
2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/walikota.
 - b. Rekening kas desa sebagaimana dimaksud dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

- c. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

3. Penatausahaan Alokasi Dana Desa

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- c. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ditutup setiap akhir bulan.

4. Pelaporan Alokasi Dana Desa

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDesa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 - 1) Laporan pelaksanaan APBDDesa.
 - 2) Laporan realisasi kegiatan.
- c. Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan peraturan desa.
- c. Peraturan desa sebagaimana dimaksud disertai dengan:
 - 1) Laporan keuangan, terdiri atas:
 - a) Laporan realisasi APBDDesa.
 - b) Catatan atas laporan keuangan.

- 2) Laporan realisasi kegiatan.
 - 3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
6. Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa
- a. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jendral Bina pemerintahan desa dan Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.
 - b. Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, ALokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada desa.
 - c. Bupati/walikota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Derah kabupaten/kota.

G. Kajian Terdahulu

TABEL 2.4

No	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember	Penelitian terdahulu meneliti kecamatan dengan 10 desa, sedangkan penelitian ini hanya fokus satu desa.	Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2.	Annivelorita (2015)	Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan	Penelitian terdahulu hanya memfokuskan penerapan ADD dalam pembangunan yang ada di Desa, Sedangkan	Penilitan terdahulu dengan penelitian ini sama-sama meneliti penerapan ADD dalam

		Pembangunan Desa	peneilitan ini selain fokus dengan penerapan ADD dalam pembangunan,penilitian ini fokus dengan pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat serta mengelola dan pertanggungjwaban laporan keuangan Desa oleh aparat terhadap publik.	pembangunan di desa sesuai dengan peraturan yang ada.
3.	Rasmah Hasman (2015)	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi	Kajian terdahulu fokus terhadap implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan penelitian ini tidak hanya implementasinya tetapi juga pertanggungjawaban atas pelaksanaan Alokasi Dana Desa(ADD)	Sama-sama meneliti penerapan Alokasi Dana Desa (ADD)
4.	Maisyah Kholmi (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Penelitian terdahulu fokus dengan prosedur pencairan ADD dan kompetensi aparat desa dalam mengelola keuangan desa. Sedangkan penelitian	Sama-sama meneiliti tentang pengelolaan ADD dan pertanggung jawaban laporan keuangan desa.

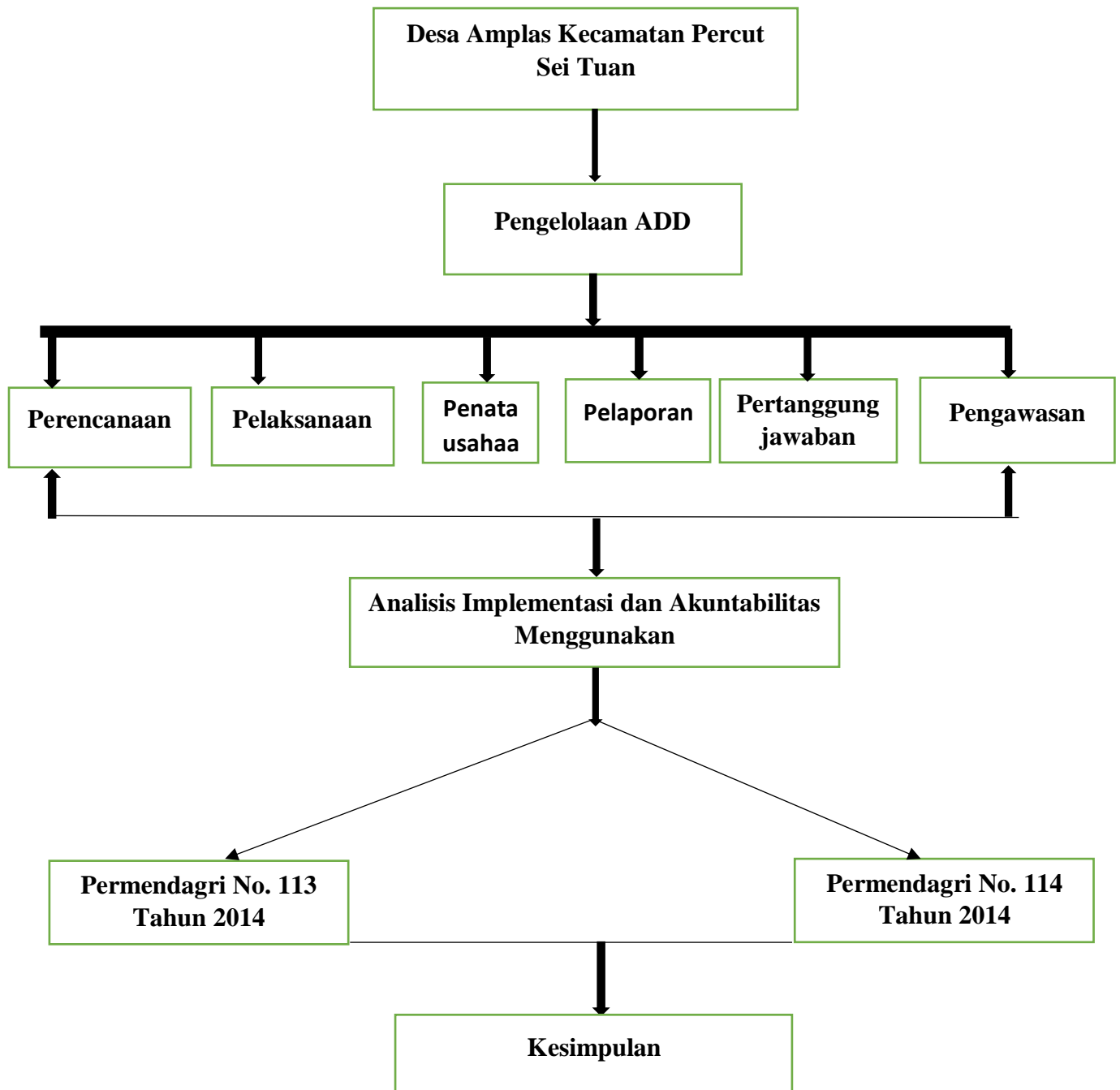
			ini fokus terhadap penerapan ADD sesuai dengan peraturan dan mengelola dan pertanggungjawaban laporan keuangan Desa oleh aparat terhadap publik.	
5.	Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Jombang.	Penelitian terdahulu meneliti tentang pengelolaan keuangan desa sedangkan penelitian ini meneliti tentang penerapan ADD sesuai peraturan dan pertanggungjawaban laporan keuangan desa.	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawaban laporan keuangan.
6.	Moh. Sofiyanto dkk (2017)	Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Simpang	Penilitan terdahulu fokus dengan pengelolaan dana desa dalam aspek pembangunan sedangkan penelitian ini fokus penerapan ADD dan pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan desa.	Sama-sama meneliti dengan pengelolaan keuangan desa.
7.	Arista Widiyanti (2017)	Akuntabilitas dan Transfaransi	Penelitian terdahulu fokus terhadap dua desa dalam studi kasusnya,	Sama-sama meneliti akuntabilitas atau pertanggungjawaban

		Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan).	sedangkan penelitian ini fokus satu desa.	dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
8.	Riska Apriliana (2017)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> .	Penelitian terdahulu fokus terhadap penerapan <i>Good Governance</i> dengan arti dalam manajemen pembangunan, sedangkan penelitian ini bukan hanya dalam pembangunan, melainkan ada pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat.	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan mewujudkan pembangunan desa.

H. Kerangka Konsep

Gambar 2.1

Kerangka Konsep



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Usman dan Purnomo dalam Sri Lestari mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.⁵⁴

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Data penelitian kualitatif, adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih luas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.⁵⁵

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2019. Lokasi penelitian Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah di desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang. Tempat penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

⁵⁴ Sri Lestari, “ *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)* ”, Skripsi IAIN Surakarta. 2017, h. 38

⁵⁵ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2016), h. 4.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat yaitu Kepala desa, sekretaris desa, Kaur keuangan, Kaur Umum dan perencanaan .

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak desa mengenai Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang.

2. Data Sekunder

Menurut Sanusi dalam Sri Lestari, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa Amplas.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Menurut Hamid Patlima wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada alasan, pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. Kedua, bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang mendatang.⁵⁶ Menurut Prabowo dalam Nur Ahmadi Bi Rahmani, wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, aranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.⁵⁷ Pada penelitian ini

⁵⁶ Hamid Patlima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, cet 4, 2013), h. 68.

⁵⁷ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2016), h. 52.

wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton dalam Nur Ahmadi Bi Rahmani, dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.⁵⁸ Pertanyaan ini modifikasi dari penelitian terdahulu

2. Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Menurut Nawawi dan Martini dalam Nur Ahmadi Bi Rahmani, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala objek penelitian.⁵⁹ Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteks. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek Selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dalam Sri Lestari, Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi, dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, *soft file*, data otentik, dan arsip lainnya yang berhubungan dengan Implementasi dan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan obesrvasi.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Sri Lestari, “ *Analaisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)* ”, Skripsi IAIN Surakarta. 2017, h. 40

4. Studi Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang sintetis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono dalam Sri Lestari).⁶¹

⁶¹ *Ibid, h. 41*

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian dari provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota Deli Serdang berada di Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 33 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini memiliki sumber daya alamnya yang sangat besar sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup menjanjikan. Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis berada pada 2° 57" Lintang Utara, 3° 16" Lintang Selatan dan 98° 33"-99° 27" Bujur Timur dengan ketinggian 0-500 m di atas permukaan laut.

- a. Wilayah kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Langkat dan Selat Malaka.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Karo dan Simalungun.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Langkat dan Karo.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Serdang Berdagai.

2. Gambaran Umum Kecamatan Percut Sei Tuan

Secara geografis kecamatan Percut Sei Tuan beradad di kabupaten Deli Serdang dan batas administratif wilayah kecamatan Percut Sei Tuan berbatasan dengan beberapa kecamatan yang ada di kota Medan dan berbatasan juga dengan kecamatan Labuhan Deli dan kecamatan Batang Kuis. Adapun mengenai administrasi kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan selat malaka.
- b. Sebelah Selatan berbatasan denghan Kota Medan.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Batang kuis dan Pantai labu.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kota Medan dan kecamatan labuhan Deli.

Luas wilayah kecamatan Percut Sei Tuan adalah 190,79 km² yang terdiri dari 18 desa, 2 kelurahan, 230 dusun dan 24 lingkungan dengan ibukota kecamatan adalah desa Tembung.

3. Gambaran Umum Desa Amplas

a. Sejarah Desa

Desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang sekitar tahun 1942 s/d 1978 adalah terdiri dari 2 desa yaitu Binje Amplas (kelurahan Binje Amplas kecamatan Medan Denai) dan Desa Timbang Deli (kelurahan Timbang Deli kecamatan Medan Amplas). Wilayah desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan pada masa kolonial Belanda adalah daerah perkebunan tembakau Deli. Pada sekitar tahun 1978 kampung Tambak Rejo dan Tambak Rejo Timur (desa Binje Amplas yang dipimpin oleh kepala desa bernama Bapak Marjan) serta kampong Bangun Setia Atas dan Bawah (desa TimbangDeli yang dipimpin oleh kepala desa bernama bapak Atmo Rejo).

Pada tahun 1978 dua wilayah tersebut digabung menjadi satu yaitu desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan. Dua wilayah tersebut tidak mau pindah menjadi kota Madya Medan dikarenakan dua desa induknya terkena perluasan kota Madya Medan. Desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan saat ini dikepalai oleh seorang kepala desa dari kaum muda yang bernama Edi Purwanto hingga sekarang desa Amplas kecamatan Percut sei Tuan dan menjadi penerus sejarah di desa khususnya desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan.

Adapun pejabat kepala desa Amplas sampai sekarang sebagai berikut:

- 1) Marjan/ Atmorejo
- 2) M. Thalib Hasibuan (1978-1980 pejabat pelaksana)
- 3) Meter Silangit (1980-1988 devenitif)
- 4) Kaman Barus (1988-1994 devenitif)
- 5) Paino
- 6) Suharto (1994-2002 devenitif)
- 7) Suharto (2002-2003 devenitif)

- 8) Edi Purwanto (2003-2004 pelaksana)
- 9) Adi Siswanto (2004-2005 pelaksana)
- 10) Edi Purwanto (2005-2011 deventif)
- 11) Ezwir N Pelos (2011-2012 pelaksana)
- 12) Edi Purwanto (2012-2018 deventif)

b. Letak Geografis

Desa Amplas termasuk wilayah kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang provinsi Sumatera utara. Desa Amplas memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Berbatasan dengan desa Bandar Klippa.
- 2) Sebelah Timur: Berbatasan dengan kecamatan Batang Kuis dan Tanjung Morawa.
- 3) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan kecamatan Tnjung Morawa dan Medan amplas.
- 4) Sebelah Barat: Berbatasan dengan kecamatan Medan Amplas dan Medan Denai.

Desa Amplas memiliki jarak tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat 3 km, lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 20 menit. Jarak ke ibu kota kabupaten 30 km, lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 60 menit.

c. Letak Demografi

Luas wilayah desa Amplas adalah 1.928 ha, terdiri dari:

Tabel 4.1

No	Wilayah	Luas
1.	Permukiman	263,3 ha
2.	Pertanian/Perkebunan	274 ha
3.	Ladang/Tegalan	1.309 ha
4.	Hutan	-
5.	Rawa-Rawa	7 ha
6.	Perkantoran	0,2 ha
7.	Jalan	70 ha

8.	Sekolah	2,5 ha
9.	Lapangan Sepak Bola	2 ha
	Jumlah	1.928 ha

Sumber: Pemerintah Desa Amplas 2018.

Jumlah penduduk 2.203 kepala keluarga, berdasarkan jenis kelamin di desa Amplas yaitu:

Tabel 4.2

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-Laki	4.590 Jiwa
2.	Perempuan	4.354 Jiwa
	Jumlah	8.944 Jiwa

Sumber: Pemerintah Desa Amplas 2018.

d. Kondisi Ekonomi Desa Amplas

Mayarakat desa Amplas memiliki mata pencaharian, seperti:

Tabel 4.3

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	312 orang
2.	Pedagang	91 orang
3.	PNS	236 orang
4.	Tukang	785 orang
5.	Guru	52 orang
6.	Bidan/Perawat	29 orang
7.	TNI/Polri	23 orang
8.	Pensiunan	53 orang
9.	Sopir/Angkutan	80 orang
	Jumlah	1.661 orang

Kondisi perekonomian masyarakat desa Amplas ditunjang dari berbagai bidang, seperti : pertanian, peternakan dll.

Tabel 4.4

Bidang Pertanian dan Perikanan

No	Jenis Tanaman	Luas
1.	Padi Sawah	274 ha
2.	Padi ladang	1 ha
3.	Jagung	886 ha
4.	Palawija	58 ha
5.	Tembakau	-
6.	Tebu	1 ha
7.	Kakao/Coklat	10 ha
8.	Sawit	-
9.	Karet	-
10.	Kelapa	1 ha
11.	Kopi	-
12.	Singkong	166 ha
13.	Lain-lain	186 ha
14.	Kolam Ikan	10 ha
	Jumlah	1.593 ha

Sumber: Pemerintah Desa Amplas 2018.

Tabel 4.5

Bidang Peternakan

No	Jenis Ternak	Jumlah
1.	Kambing	954 ekor
2.	Sapi	586 ekor
3.	Kerbau	63 ekor

4.	Ayam	70.000 ekor
5.	Itik	1.500 ekor
	Jumlah	73.103 ekor

Sumber: Pemerintah Desa Amplas 2018

e. Kondisi Sosial Desa Amplas

1) Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal yang sangat penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi menjadi salah satu indikator dalam merubah pola pikir generasi muda dalam menghadapi masa depan yang lebih cemerlang. Dengan pendidikan tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat dalam berpikir, keterampilan kewirausahaan dan lapangan pekerjaan. Dengan pendidikan, kita bukan saja untuk mencari kerja tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dengan pola pikir yang luas. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Tabel 4.6

Kelompok Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan		Jumlah
a)	TK	214 Orang
b)	SD/MI	944 Orang
c)	SMP/MTs	173 Orang
d)	SMA/MA	151 Orang
e)	S1/Diploma	-
	Jumlah	1.482 Orang

Sumber: Pemerintahan Desa Amplas 2018

2) Lembaga Pendidikan

Tabel 4.7

Gedung		Jumlah	Lokasi
a)	TK/PAUD	5	Dusun I dan III.A
b)	SD/MI	4	Dusun I, III dan III.A
c)	SMP/MTs	2	Dusun III.A Selambo
d)	SMA/MA	2	Dusun III.A Selambo
e)	Sekolah Tinggi	1	Dusun III.A Selambo
Jumlah		14 Gedung	

Sumber: Pemerintahan Desa Amplas 2018.

3) Kesehatan

Kesehatan sangatlah penting bagi seluruh manusia. Dengan kesehatan semua masyarakat dapat melakukan segala aktivitas sesuai yang mereka inginkan. Kesehatan dapat dicapai dengan segala hal seperti pola makan yang teratur dan bergizi, olahraga, imunisasi, penggunaan air bersih dll.

Tabel 4.8

a)	Kematian Bayi	Jumlah
	-Jumlah Bayi Lahir pada tahun 2018	31 Orang
	-Jumlah Bayi Meninggal Tahun 2018	-
b)	Kematian Ibu Melahirkan	
	-Jumlah Ibu Melahirkan Tahun 2018	31 Orang
	-Jumlah Ibu Melahirkan Meninggal 2018	-
c)	Cakupan Imunisasi	
	-Cakupan Imunisasi Polio 3	20 Orang
	-Cakupan Imunisasi DPT-1	6 Orang
	-Cakupan Imunisasi Cacar	-
d)	Gizi Balita	
	-Jumlah Balita	148 Orang

	-Balita Gizi Buruk	-
	-Balita Gizi Baik	148 Orang
	-Balita Gizi Kurang	-
e)	Pemenuhan Air Bersih	
	-Penggunaan Sumur Galian	1.887 KK
	-Penggunaan Air PAM	30 KK
	-Penggunaan Sumur Pompa	15 KK
	-Penggunaan Sumur Hidran Umum	-
	-Penggunaan Air Sungai	3 KK

Sumber: Pemerintahan Desa Amplas 2018

4) Keagamaan

Indonesia sebagai Negara yang berketuhanan sesuai Pancasila dan menganut 6 agama. Setiap warga Negara berhak memeluk agama sesuai mereka yakini.

Tabel 4.9

Data Keagamaan Desa Amplas

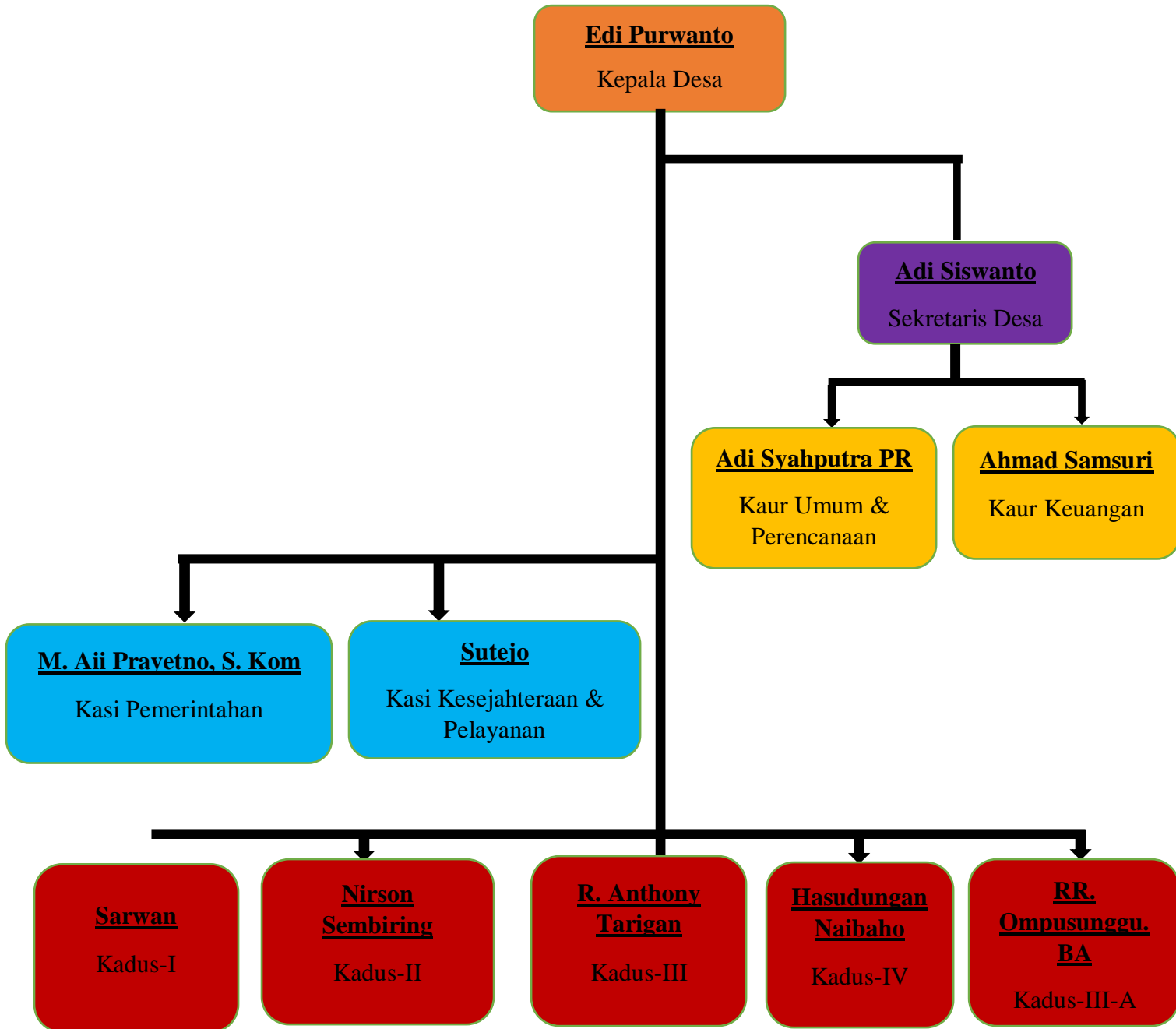
	Agama	Jumlah Pemeluk
a)	Islam	4.782 Orang
b)	Katolik	752 Orang
c)	Kristen	3.378 Orang
d)	Hindu	26 Orang
e)	Budha	6 Orang

Sumber: Pemerintahan Desa Amplas 2018.

f. Struktur Pemerintahan Desa Amplas

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Amplas



B. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktual.

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan di desa Amplas, bahwa implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dilaksanakan sesuai RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari kepala desa Amplas sebagai berikut:

”Pelaksanaan atau penerapan Alokasi Dana Desa sudah sesuai peraturan dek dan sesuai RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Tapi masih ada yang diperaturan Permendagri No.113 Tahun 2014 belum semua dapat dilaksanakan seperti Bumdes. Kami hanya melaksanakan yang lebih prioritas dek dan yang sangat dibutuhkan masyarakat desa” (Kepala Desa Amplas. 30 Januari 2019).⁶²

Dari pernyataan kepala desa di atas bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan Permendagri No.113 & 114 Tahun 2014 karena Bumdes belum dilaksanakan. Dengan begitu penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dikatakan belum optimal karena belum seseuai Permendagri No.113 tahun 2014. Dari pernyataan diatas bahwa desa Amplas masih menggunakan Permendagri No. 113 & 114 Tahun 2014 dan belum menggunakan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dikarenakan Peraturan desa Amplas tentang anggran pendapatan dan belanja desa tahun 2018 telah disepakati dan disahkan bulan April 2018, sedangkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 disahkan bulan Mei 2018.

Tentang pembangunan infrastruktur desa Amplas, masih ada infastruktur yang belum dibangun. Sesuai dengan pernyataan kepala desa Amplas sebagai berikut:

“Pembangunan infrastruktur di desa Amplas masih ada yang belum diperbaiki seperti jalan yang ada di dusun I dek, karena jalan itu bukan wilayah yang didanai oleh Alokasi Dana Desa atau Dana Desa, tapi itu tugas dari dinas pekerjaan umum kabupaten dek. Makanya belum diaspal karena bukan tanggung jawab pemerintah desa amplas” (Kepala Desa Amplas, 30 Januari 2019).⁶³

⁶² Edi Purwanto, Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Wawancara Langsung, Tanggal 30 Januari 2019.

⁶³ Edi Purwanto, Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Wawancara Langsung, Tanggal 30 Januari 2019.

Tabel 4.10
Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menurut Permendagri No.
113 & 114 Tahun 2014

Pemendagri No. 113 & 114 Tahun 2014	Implementasi Peneglolaan Alokasi Dana Desa 2018
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.	
1. Penetapan dan penegasan batas desa.	-
2. Pendataan desa.	Pendekatatan desa berdasarkan kewenangan desa (profil desa, monografi, pendataan desa dan lainnya).
3. Penyusunan tata ruang desa.	-
4. Penyelenggaraan Musyawarah desa.	Biaya rapat desa.
5. Pengelolaan informasi desa	Telepon dan internet.
6. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa.	-
7. Penyelenggaraan kerja sama antar desa.	-
8. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa.	Pengadaan gedung kantor, pengecatan kantor dan pagar kantor.
9. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.	Penghasilan tetap dan tunjangan, operasional perkantoran, operasional BPD, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD.
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1. Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, infrastruktur dan lingkungan desa seperti: Tambatan perahu, jalan permukiman, jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian,	Jalan permukiman.

pembangkit listrik dan mikrohidra, lingkungan permukiman masyarakat desa	
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan lainnya.	Pelayanan kesehatan.
3. Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: Taman bacaan masyarakat, PAUD, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.	Balai umum
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar desa, pembentukan dan pembangunan pasar desa, penguatan permodalan bumdesa, sarana dan prasarana sesuai kondisi desa dan lain-lain.	-
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai, perlindungan terumbu karang, dan kegiatan desa lainnya	Pembangunan drenase.
Bidang Pembinaan Kemaayarakatan	
1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.	LKMD, PKK, Karang taruna.

2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.	-
3. Pembinaan kerukunan umat beragama.	Perlombaan MTQ desa.
4. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.	Pengadaan tenis meja.
5. Pembinaan lembaga adat.	-
6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.	Pelatihan pembuatan acrole dan pelatihan pembuatan roket ubi.
7. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.	
Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian dan perdagangan.	-
2. Pelatihan teknologi tepat guna	-
3. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD.	Penyuluhan kepala dusun, bimbingan teknis SDM sekretaris desa dan BPD, pelatihan SDM perangkat desa.
4. Peningkatan kapasitas masyarakat.	-

Berdasarkan table di atas, desa belum optimal dalam membangun desanya dikarenakan belum mampunya desa dalam meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Alokasi Dana Desa itu belum terealisasi dengan optimal sesuai dengan tujuan dari Program itu sendiri. Dalam hal ini diantaranya adalah belum diterapkannya Penerapan BUMDes, Pasar Desa, dan lainnya sesuai Permendagri 113 & 114 Tahun 2014. Oleh karena itu perlunya dilakukan sosialisasi lebih lanjut dan pelatihan khusus pengembangan usaha Desa untuk dapat diterapkannya BUMDes guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

C. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*participal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁶⁴

Pertanggungjawaban ini disajikan bagi pihak-pihak yang membutuhkan atas implementasi atau pelaksanaan program dari dana-dana yang diterima. Dengan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan tentang dana-dana yang dikeluarkan atas program yang dilaksanakan maka menerapkan transparansi kepada masyarakat atau pihak internal maupun eksternal yang membutuhkan. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin yang dikelola dalam periode satu tahun anggaran.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa maka desa melakukan beberapa tahapan:

1. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan adalah tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam tahap perencanaan ini setiap dusun melakukan musyawarah dusun (Musdus) untuk menampung pendapat dan usulan dari masyarakat di setiap dusun yang ada di desa. Selain itu, pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa meliputi RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Sekretaris desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rencana peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa. Kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dibahas dan disepakati.⁶⁵

⁶⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, cet 4, 2009), h. 20

⁶⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri N0. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

RPJM Desa dan RKP Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDesa yang berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan.

Sementara pada tahap perencanaan desa Amplas ada beberapa mekanismenya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa Amplas sebagai berikut:

“Mekanismenya dek dimulai dari Musdus, Musdes, RKP Desa, RPJM Desa, dan APBDesa. RPJM ini direncanakan tahun 2015 untuk jangka 6 tahunan. Pemerintah desa melakukan sesuai prosedur dan peraturan yang ada” (Sekretaris Desa, 30 Januari 2019).⁶⁶

Sekretaris desa menyatakan bahwa pemerintah desa Amplas telah melakukan prosedur yang ada sesuai dengan peraturan.

Musyawarah Desa (Musdes) merupakan forum diskusi usulan rencana kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk tahun berkenaan. Dalam Musdes ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan khusus desa yang bersangkutan dan kegiatan akan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan seluruh elemen.

Sesuai dengan jawaban sekretaris desa dan Kaur umum dan perencanaan dari wawancara yang dilakukan tentang keterlibatan dan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat sangat aktif dan mendukung kegiatan yang akan direncanakan dek. Dalam Musdes ini dek semua elemen di undang dalam rapat seperti Pemdes, LKMD, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok petani, Pers dan Kepala Dusun. Kepala dusun ini dek membawa aspirasi masyarakat waktu Musdus” (Sekretaris Desa, 30 Januari 2019).⁶⁷

⁶⁶ Adi Siswanto, Sekretaris Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Wawancara Langsung, 30 Januari 2019.

⁶⁷ *Ibid.*

“Setiap saran dalam musyawarah diterima dan disaring mana yang perlu diprioritaskan dan sesuai anggaran” (Kaur Umum dan Perencanaan, 29 Januari 2019).⁶⁸

Dari keterangan diatas menunjukkan prinsip partisipasi masyarakat desa Amplas sangat antusias. Mereka sangat mendukung dan hadir setiap diundang dalam rapat atau musyawarah

Prinsip terpenting dalam Musdes ini adalah prinsip transparansi oleh masyarakat desa dan partisipasi masyarakat. Prinsip transparansi ini dapat terlihat dari peraturan desa yang dinuat setelah hasil musyawarah yang telah disepakati bersama. Sedangkan prinsip partisipasi dapat dilihat dari seberapa besar komitmen pemerintah desa yang selalu melibatkan lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah dan kegiatan yang diadakan desa.

Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

” Program yang didanai dari ADD seperti drainase, pemberdayaan PKK, pelatihan perangkat desa, pelatihan kesenian dan lain lain dek. Selain itu ada juga bidang lain yang didanai ADD seperti pembinaan kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah desa” (Kepala Desa Amplas, 30 Januari 2019).⁶⁹

Dari wawancara diatas bahwa program yang didanai ADD cukup banyak, bukan hanya dari bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetapi bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan kemasyarakatan juga didanai ADD. Maka dari itu bahwa dalam penyelenggaraan program sudah ada dana yang disediakan, tinggal pemerintah desa dan masyarakat mengelola dana tersebut dengan bijak.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam pelaksanaan anggaran desa sudah ditetapkan sebelum timbulnya transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui

⁶⁸ Adi Syahputra PR, Kaur Umum dan Petrencanaan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Wawancara Langsung, 29 Januari 2019.

⁶⁹ Edi Purwanto, Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Wawancara Langsung, Tanggal 30 Januari 2019.

rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah begitu halnya mengenai pengeluaran dana untuk pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Amplas.

Untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana harus melibatkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa.⁷⁰

Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala desa Amplas tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

“Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan itu drainase, pembangunan jalan, pemberdayaan PKK, pelatihan kesenian dan pelatihan pernakat desa. Untuk pembangunan kita aparat desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan yang ada desa. Tenaga kerja dari masyarakat desa. Karena untuk mengurangi pengangguran dan menambah penapatan mereka dek” (Kepala desa Amplas, 30 Januari 2019).⁷¹

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa atau kegiatan pemerintah harus terbuka dengan dana yang sudah dikeluarkan. Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan dengan Kaur Keuangan/Bendahara sebagai berikut:

“Setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, informasinya kami tampilkan atau kami letak di papan informasi agar masyarakat dapat melihatnya” (Kaur Keuangan/Bendahara, 30 Januari 2019)⁷²

Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaksanaan Alokasi dana desa semua dilaporkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kaur Keuangan/bendahara sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa akan disampaikan diakhir tahun denmgan diadakan pertemuan”

⁷⁰ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷¹ Edi Purwanto, Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Wawancara Langsung, Tanggal 30 Januari 2019.

⁷² Ahmad Samsuri, Kaur keuangan DesaAmplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Wawancara Langsung, Tanggal 30 Januari 2019.

3. Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ini bendahara harus melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas desa dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi salah pencatatan jika dilakukan setiap pengeluaran dan penerimaan kas desa. Setiap pengeluaran dan penerimaan wajib bendahara bertanggungjawab atas uang yang keluar dan masuk. Penatausahaan kas keluar dan masuk menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku bank.

Hal ini sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan jawaban narasumber atas pertanyaan yang diberikan mengenai penatusahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

“Jadi dek, saya selaku bendahara desa melakukan pencatatan atas pengeluaran dan penerimaan kas desa seperti pembelian alat-alat oprasional kantor, konsumsi rapat dan lain-lain harus menggunakan bukti seperti bon faktur. Setelah Itu saya laporkan kepada kepala desa setiap bulan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Kami selalu taat peraturan dek” (Kaur keuangan/bendahara, 30 Januari 2019).⁷³

4. Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaporan ini dilakukan agar pemerintah daerah mengetahui tentang pelaksanaan APBDesa. Pelaporan ini dilakukan semester pertama dan semester akhir tahun.

Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber atas pertanyaan tentang proses pelaporan Pengelolaan Alokasi dana Desa sebagai berikut:

“Pelaporan tentang Alokasi dana Desa dilakukan 2 tahap dek, tahap semester pertama dan tahap semester akhir tahun, dan yang dilaporkan tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDes” (Kaur Keuangan/bendahara, 30 Januari 2019).⁷⁴

⁷³ Ahmad Samsuri, Kaur keuangan DesaAmplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Wawancara Langsung, Tanggal 30 Januari 2019.

⁷⁴ Ahmad Samsuri, Kaur keuangan DesaAmplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Wawancara Langsung, Tanggal 30 Januari 2019.

5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa harus sesuai dengan Permendagri No. 113 & 114 Tahun 2014 seperti laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan kekayaan milik desa, dan program pemerintah desa. Hal ini dilakukan agar terciptanya transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat desa maupun pemerintah daerah dan pihak yang membutuhkan.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa ada berapa jenis pelaporan. Hal ini disampaikan oleh Kaur Keuangan/Bendahara desa sebagai berikut:

“Pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa seperti RKP, RPJM, LRA, bon faktur atas transaksi, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan kekayaan milik desa. Dan pelaporan ini sekarang sudah sistem online Siskeudes langsung ke pusat” (Kaur Keuangan/Bendahara desa, 30 Januari 2019).⁷⁵

“Pelaporan pertanggungjawaban Alokasi Dana desa sudah melauli jalur struktural” (Kaur Keuangan/Bendahara desa).⁷⁶

Bendahara desa juga menyatakan tidak ada kesulitan dalam pertanggungjawaban, tetapi ada kendala dalam transaksi ketika pembelian barang, toko tidak ada NPWP. Berdasarkan wawancara semua pelaporan pertanggungjawaban sudah sesuai peraturan dan struktural. Pernyataan dari bendahara Desa Amplas telah melaksanakan sesuai konsistensi pernyataan. Hal ini dapat dilihat dari publikasi kegiatan yang dilaksanakan di papan informasi di kantor desa Amplas.

6. Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengawasan sangat diperlukan saat pelaksanaan kegiatan yang ada. Hal ini dilakukan agar tidak ada penyelewengan dana atau penyimpangan lainnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam pengawasan pengelolaan

⁷⁵ Ahmad Samsuri, Kaur keuangan DesaAmplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Wawancara Langsung, Tanggal 30 Januari 2019.

⁷⁶ Ahmad Samsuri, Kaur keuangan DesaAmplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Wawancara Langsung, Tanggal 30 Januari 2019.

Alokasi Dana Desa ada beberapa pengawasan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala desa sebagai berikut:

“Setiap kegiatan di desa ada pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh Tim Pelaksana Pembangunan, LKMD, BPD, Tim Pendamping Desa dari kabupaten atau kecamatan. Masyarakat juga mengawasi kegiatan yang dilaksanakan” (Kepala Desa Amplas, 30 Januari 2019).⁷⁷

Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa, bukan hanya lembaga terkait saja mengawasi tetapi masyarakat juga dapat berkontribusi dan terlibat dalam mengawasi kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini agar masyarakat dan pemerintah saling berkoordinasi agar terwujudnya transparansi.

⁷⁷ Edi Purwanto, Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Wawancara Langsung, Tanggal 30 Januari 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan tertuang secara eksplisit dalam hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian “Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera utara)” sebagai berikut:

1. Tahap implementasi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tahun 2018 di desa Amplas telah dilaksanakan atau diterapkan sesuai dengan RKP yang telah disusun berdasarkan dari hasil musyawarah. Implementasi ini dibuktikan dengan adanya bidang-bidang yang telah diterapkan seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Pada bidang pembinaan masyarakat masih terdapat penerapan yang belum *continue* (berlanjut) di lihat dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa pada tahun 2016 untuk bidang ini pengelolaan Alokasi Dana desa tidak diterapkan tetapi pada tahun 2017 dan 2018 bidang ini sudah diterapkan.

Namun dalam implementasi pengelolaan alokasi dana desa dari sejak diluncurkan sampai tahun 2018 belum diterapkan secara optimal sesuai dengan Permendagri No 113 & 114 tahun 2014 seperti pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif seperti Bumdes dan pasar desa. Dengan didirikan Bumdes dan pasar desa dapat memicu sumber pendapatan masyarakat desa dan pemerintah desa, contohnya seperti didirikan usaha koperasi desa dengan memberdayakan masyarakat untuk mengelola dengan dibekali pelatihan dan diawasi pemerintah desa.

2. Tahap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya telah selesai dan lengkap. Pengelolaan alokasi dana desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Dari tahapan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Pertanggungjawaban atas program pemerintah desa yang telah dilaksanakan disajikan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan kekayaan milik desa. Pertanggungjawaban pemerintah desa juga dilaporkan dan disajikan pemerintah desa melalui aplikasi online. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) secara teknis dan administrasi sudah baik, serta adanya papan informasi tentang penggunaan dana Alokasi Dana Desa, namun tetap harus mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten.

B. Saran

Mengacu dari hasil penelitian yang diuraikan diatas, selanjutnya dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa Amplas disarankan agar mengimplementasikan atau membangun Bumdes dan pasar desa serta bidang lainnya sesuai Permendagri No. 113 & 114 Tahun 2014 untuk agar menambah sumber pendapatan pemerintah desa dan masyarakat desa serta mengurangi pengangguran. dan menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 ditahun berikutnya .
2. Peneliti Selanjutnya disarankan agar menambah lagi informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2007.
- Khaddafi, Muammar et. al. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Didalam Akuntansi*. Medan: Penerbit Madenatera. 2016.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2009.
- Mardiasmo. *Otonomi Daerah dan dan manajemen keuangan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2002.
- Mulawarman, Aji Dedi. *Akuntansi Syariah Teori Konsep dan Laporan Keuangan*. Jakarta: E Publishing Company. 2009.
- Nordiawan, Deddi et. al. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.
- Nurmala, Eka Sari. *Akuntansi Sektor Publik*. Medan: Perdana Publishing. 2017.
- Patlima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Person, Wayne. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi UIN-SU Press. 2016.
- Siregar, Baldrio. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2017.
- Suparmoko, M. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2002.

Soeradi. *Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.

Yuwono, Sony et. al. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Banyu Media Publishing. 2005.

Annivelorita. *Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa*. *Jurnal Administrasi Negara*, 3 (5): 1712-1726. 2015.

Apriliana, Riska. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. Skripsi, Surakarta: IAIN Surakarta. 2017.

Arifiyanto, Dwi Febri., & Kurrohman, Tufik. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember”. *Jurnal Riset dan Akuntansi Keuangan*, 2 (3), 473-485. 2014.

Hasman, Rasmah. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi*. *Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 11: 107-117. 2015.

Kholmi, Masiyah. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. *Jurnal Ekonomika Bisnis*, Vol. 07 N0. 02: 143-152. 2016.

Nafidah, Lina Nasehatun., & Annisa, Nur. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang”. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 10 (02): 273-288. 2017.

Sofiyanto, Moh., Malavia, Rony Mardani., & Agus, M. Salim. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Simbang*. *Jurnal Riset Manajemen*. 2017.

Widiyanti, Arista. *Akuntabilitas dan Transfaransi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.


Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-undang RI No. 6 Tahun Tentang Desa 2014.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Lampiran 1

Surat Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN DEIRANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
DESA AMPLAS

SEKRETARIAT : JALAN PROTOGIL, DESA AMPLAS, KODE POS 2021

Amplas, 25 Januari 2019

Nomor : 470 / 158 / 2019
 Sifat : Penting.
 Lamp : -
 Perihal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 Bapak Wakil Dekan Bidang
 Akademik dan Pengembangan
 UIN Sumatera Utara
 di.-
 Tempat

Sehubungan dengan surat Wakil Dkan Bidang Akademik dan
 Pengembangan UIN Sumatera Utara Nomor : B-423/EB.I/PP.00.9/01/2019
 Tanggal 24 Januari 2019 Perihal tersebut diatas atas nama mahasiswa :


Nama : CANDRA SUYATMIKO
 NIM : 52151007
 Tempat/Tgl. Lahir : Batu Lima, 12 Desember 1996
 Sem/Jurusan : VII/Akuntansi Syariah

Kami atas nama Pemerintah Desa Amplas pada Prinsipnya tidak
 merasa keberatan atas perihal yang di maksud selama tidak melanggar
 Undang-undang dan Peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dan Setelah selesai melakukan Riset agar Mahasiswa/I Bapak
 Melaporkan hasil Riset tersebut Kepada Pemerintah Desa Amplas Kecamatan
 Percut Sei Tuan.

Demikian kami sampaikan agar dapat dimaklumi.

Kepala Desa Amplas


EDIRWANTO

Lampiran 2

Daftar Pedoman Wawancara

Narasumber: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur umum dan perencanaan.

1. Tahap Perencanaan

- a. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan pemerintah Desa Amplas?
- b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
- c. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
- d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD)?
- e. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)?
- b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
- c. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
- d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan?
- e. Apakah pembangunan infrastruktur desa Amplas sudah dibangun atau diperbaiki?
- f. Apakah pelaksanaan atau penerapan Alokasi Dana Desa sudah sesuai perencanaan.

3. Tahap Penatausahaan
 - a. Bagaimana penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
4. Tahap Pelaporan
 - a. Bagaimana proses pelaporan yang dilakukan pemerintah desa tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
5. Tahap Pertanggungjawaban
 - a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
 - b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakaukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
 - c. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?
 - d. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur stuktural yang telah ditentukan?
 - e. Apakah telah sesuai pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
6. Tahap Pengawasan
 - a. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah kepada desa dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Lampiran 3
Hasil wawancara

Informan : Edi Purwanto
Jabatan : Kepala Desa Amplas
Tempat : Kantor Desa Amplas
Tanggal : 30 Januari 2019

1. Tahap Perencanaan

- a. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan pemerintah Desa Amplas?

Jawaban: dimulai dari musdus, musdes, RKP Desa, RPJM, dan APBDesa.

- b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Partisipasi masyarakat sangat antusias dek. Terbukti ketika diundang rapat mereka selalu hadir.

- c. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Pemdes, Kadus, , LKMD, BPD, PKK, Pers, Kelompok Tani, Tokoh Agama, Babinsu, TNI dan Polri.

- d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Program yang didanai dari ada seperti drainase, pemberdayaan PKK, Pelatihan kesenian, Pelatihan perangkat desa. Selain itu ada juga bidang lain yang didanai ADD seperti pembinaan masyarakat desa dan penyelenggaraan pemerintah desa.

- e. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Setiap pendapat diterima semua, setelah itu dipilih sesuai program yang akan dilakukan.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Sangat berperan dan penyampaian informasi melalui papan informasi yang berada di kantor desa.

- b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan dan informasi penggunaan dana diletakkan papan informasi.

- c. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Dilaksanakan sesuai yang direncanakan sampai dengan pertanggungjawaban dana yang digunakan.

- d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan?

Jawaban: Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan itu drainase. Pembangunan jalan, pemberdayaan PKK, pelatihan kesenian, dan pelatihan perangkat desa. Tenaga kerja dari masyarakat desa. Karena untuk mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan mereka.

- e. Apakah pembangunan infrastruktur desa Amplas sudah dibangun atau diperbaiki?

Jawaban: Pembangunan infrastruktur di desa Amplas masih ada yang belum diperbaiki seperti jalan yang ada di dusun I dek, karena jalan itu bukan wilayah yang didanai oleh ALokasi Dana Desa dan Dana Desa, tapi itu tugas dari dinas pekerjaan umum kabupaten dek. Makanya belum diaspal karena bukan tanggungjawab pemerintah desa Amplas.

- f. Apakah pelaksanaan atau penerapan Alokasi Dana Desa sudah sesuai perencanaan?

Jawaban: Pelaksanaan atau penerapan sudah sesuai peraturan dek dan sesuai RKP. Tapi masih ada yang diperaturan Permendagri No. 113 & 114 Tahun 2014 belum semua dapat dilaksanakan seperti Bumdes. Kami hanya melaksanakan yang lebih prioritas dek dan yang sangat dibutuhkan masyarakat desa.

3. Tahap Penatausahaan

- a. Bagaimana penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Penatausahaan dilakukan bendahara dengan mencatat dari proses penerimaan kas dan pengeluaran kas dek.

4. Tahap Pelaporan

- a. Bagaimana proses pelaporan yang dilakukan pemerintah desa tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Bendahara melapor kesaya tentang realisasi pelaksanaan APBdesa.

5. Tahap Pertanggungjawaban

- a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Dilaksanakan sesuai yang direncanakan sampai dengan pertanggungjawaban dana yang digunakan.

- b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: LRA, RAB, RKP, Kwitansi dan NPWP.

- c. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?

Jawaban: Ada, beberapa toko tidak memiliki NPWP

- d. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur stuktural yang telah ditentukan?

Jawaban: Sudah. Bahkan pelaporan melalui system online juga.

- e. Apakah telah sesuai pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Jawaban: pelaksanaan sudah sesuai RKP.

6. Tahap Pengawasan

- a. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah kepada desa dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: Setiap kegiatan yang ada di desa ada pengawasan dilakukan oleh tim pelaksana pembangunan, LKMD, BPD, Tim pendamping desa dari kabupaten atau kecamatan. Masyarakat juga mengawasi kegiatan dilaksanakan.

Hasil wawancara

Informan : Adi Siswanto
 Jabatan : Sekretaris Desa
 Tempat : Kantor Desa Amplas
 Tanggal : 30 Januari 2019

1. Tahap Perencanaan

- a. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan pemerintah Desa Amplas?

Jawaban: Mekanismenya dek dimulai dari Musdus, Musdes, RKP Desa, RPJM Desa, dan APB Desa. RPJM ini direncanakan tahun 2015 untuk jangka 6 tahunan dek. Pemerintah desa melalui prosedur dan peraturan yang ada.

- b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Partisipasi masyarakat sangat aktif dan mendukung kegiatan yang akan direncanakan dek.

- c. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Dalam Musdes ini dek semua elemen diundang dalam rapat seperti Pemdes, LKMD, BPD, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, kelompok tani, Pers, dan kepala Dusun. Kepala Dusun membawa aspirasi masyarakat waktu Musdus.

- d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Pembangunan drainase, Pemberdayaan PKK, Pelatihan perangkat desa dan lain-lain dek.

- e. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Menyerap aspirasi masyarakat yang diperlukan untuk desa.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Menggunakan papan informasi yang ada di kantor desa.

- b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Masyarakat dilibatkan dalam setiap kegiatan dan rapat desa.

- c. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Setiap kegiatan yang direncanakan selalu melibatkan masyarakat dan setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan.

- d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan?

Jawaban: Pembangunan jalan, pemberdayaan PKK, MTQ desa, pelatihan perangkat desa, pelayanan kesehatan dan lain-lain dek.

- e. Apakah pembangunan infrastruktur desa Amplas sudah dibangun atau diperbaiki?

Jawaban: Pembangunan sudah dilaksanakan.

- f. Apakah pelaksanaan atau penerapan Alokasi Dana Desa sudah sesuai perencanaan?

Jawaban: Pelaksanaan sudah sesuai RKP Desa. Semua di terapkan sesuai kebutuhan dan kesesuaian dana.

3. Tahap Penatausahaan

- a. Bagaimana penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Penatausahaan dilakukan bendahara dek, dari kas keluar dan kas masuk harus dicatat dek.

4. Tahap Pelaporan

- a. Bagaimana proses pelaporan yang dilakukan pemerintah desa tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Pelaporan juga dilakukan bendahara kepada kepala desa dek seperti laporan realisasi.

5. Tahap Pertanggungjawaban

- a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: dilaksanakan sesuai rencana, setiap program yang dilaksanakan harus ada pelaporan dan pertanggungjawaban dek dan melibatkan masyarakat dek.

- b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: RKP, RPJM. Sistem online dan bukti transaksi.

- c. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?

Jawaban: Tidak ada dek dan itu jug tugas bendahara.

- d. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur stuktural yang telah ditentukan?

Jawaban: Sudah sesuai struktural dek bahkan pelaporan melaui system online.

- e. Apakah telah sesuai pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Jawaban: Pelaksanaan sudah sesuai yang direncanakan.

6. Tahap Pengawasan

- a. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah kepada desa dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: Masyarakat desa, pihak kecamatan dan kabupaten, BPD, Polri dan TNI.

Hasil wawancara

Informan : Ahmad Samsuri
 Jabatan : Kaur Keuangan
 Tempat : Kantor Desa Amplas
 Tanggal : 30 Januari 2019

1. Tahap Perencanaan

- a. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan pemerintah Desa Amplas?

Jawaban: Dimulai dari Musdus, Musdes, RKP Desa, RPJM Desa, dan APBD Desa.

- b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Partisipasi masyarakat sangat tinggi dek.

- c. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Pemdus, tokoh masyarakat, tokoh agama dan BPD.

- d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Pembangunan jalan, Pembangunan drainase, Pemberdayaan PKK, Pelatihan perangkat desa dan BPD.

- e. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Diterima semua pendapat dan disaring.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Setiap yang dilaksanakan diumumkan dipapan informasi.

- b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, informasinya kami tampilkan atau kami letak di papan informasi agar masyarakat dapat melihatnya.

- c. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Setiap kegiatan yang dilaksanakan disampaikan atau dilaporkan akhir tahun di rapat desa dan melibatkan masyarakat.

- d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan?

Jawaban: Pembangunan jalan, pemberdayaan PKK, MTQ desa, pelatihan perangkat desa, pelayanan kesehatan.

- e. Apakah pembangunan infrastruktur desa Amplas sudah dibangun atau diperbaiki?

Jawaban: Pembangunan sudah dilaksanakan sesuai rencana.

- f. Apakah pelaksanaan atau penerapan Alokasi Dana Desa sudah sesuai perencanaan?

Jawaban: Dilaksdanakan sudah sesuai RKP Desa dan di terapkan sesuai kebutuhan masyarakat dan kesesuaian dana.

3. Tahap Penatausahaan

- a. Bagaimana penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Jadi dek, saya selaku bendahara desa melakukan pencatatan atas pengeluaran dan penerimaan kas desa seperti pembelian alat-alat oprasional kantor, konsumsi rapat dan lain-lain harus menggunakan bukti seperti bon faktur. Setelah Itu saya laporkan kepada kepala desa setiap bulan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Kami selalu taat peraturan dek.

4. Tahap Pelaporan

- a. Bagaimana proses pelaporan yang dilakukan pemerintah desa tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Pelaporan tentang Alokasi dana Desa dilakukan 2 tahap dek, tahap semester pertama dan tahap semester akhir tahun, dan yang dilaporkan tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

5. Tahap Pertanggungjawaban

- a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: dilaksanakan sesuai rencana. Setiap kegiatan yang dilaksanakan disampaikan atau dilaporkan akhir tahun di rapat desa dan melibatkan masyarakat.

- b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa seperti RKP, RPJM, LRA, bon faktur atas transaksi, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan kekayaan milik desa. Dan pelaporan ini sekarang sudah system online yaitu Siskeudes.

- c. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?

Jawaban: Kesulitannya ketika laporan harus dilaporkan tapi masih dalam pengerjaan

- d. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?

Jawaban: Pelaporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah melalui jalur structural.

- e. Apakah telah sesuai pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Jawaban: Pelaksanaan sudah sesuai yang direncanakan yang ada di RKP Desa.

6. Tahap Pengawasan

- a. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah kepada desa dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: Masyarakat desa, BPD, Pihak kecamatan dan kabupaten, Polri dan TNI.

Hasil wawancara

Informan : Adi Syahputra Purba
 Jabatan : Kaur Umum dan Perencanaan
 Tempat : Kantor Desa Amplas
 Tanggal : 29 Januari 2019

1. Tahap Perencanaan

- a. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan pemerintah Desa Amplas?

Jawaban: Melalui rapat desa seperti Musdus, Musdes, RKP Desa, RPJM Desa, dan APBD Desa.

- b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Rata-rata bergembira dan antusias.

- c. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Masyarakat desa, Kepala dusun, Pemdes, tokoh masyarakat, tokoh agama dan BPD.

- d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Drainase, jalan dan rumah ibadah.

- e. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Saran diterima dan disaring sesuai anggaran.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Sangat berperan dan penyampaian melalui papan informasi.

- b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Memberikan informasi melalui papan informasi dan melibatkan masyarakat.

- c. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Ini wewenang bendahara desa dek. Tetapi setiap kegiatan yang dilaksanakan harus ada pertanggungjawaban.

- d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan?

Jawaban: Pembangunan jalan, pemberdayaan PKK, MTQ desa, pelatihan perangkat desa, pelayanan kesehatan.

- e. Apakah pembangunan infrastruktur desa Amplas sudah dibangun atau diperbaiki?

Jawaban: Pembangunan sudah dilaksanakan seperti pembangunan jalan.

- f. Apakah pelaksanaan atau penerapan Alokasi Dana Desa sudah sesuai perencanaan?

Jawaban: Sudah sesuai dek dengan yang direncanakan.

3. Tahap Penatausahaan

- a. Bagaimana penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Bendahara yang melakukan pencatatan dek.

4. Tahap Pelaporan

- a. Bagaimana proses pelaporan yang dilakukan pemerintah desa tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Bendahara melaporkan kepada kepala desa dek.

5. Tahap Pertanggungjawaban

- a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: Setuao kegiatan yang dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan dengan laporan.

- b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakaukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawaban: RKP, RPJM dan laporan realisasi.

- c. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?

Jawaban: Tidak ada.

- d. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur stuktural yang telah ditentukan?

Jawaban: Sudah sesuai struktural.

- e. Apakah telah sesuai pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Jawaban: Pelaksanaan sudah sesuai yang direncanakan.

6. Tahap Pengawasan

- b. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah kepada desa dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: Masyarakat desa, BPD, Pihak kecamatan dan kabupaten, Polri dan TNI.

Lampiran 4

Dokumentasi Saat Wawancara



(Kantor Desa Amplas)



(Wawancara kepada Kepala Desa)



(Wawancara kepada Sekretaris Desa)



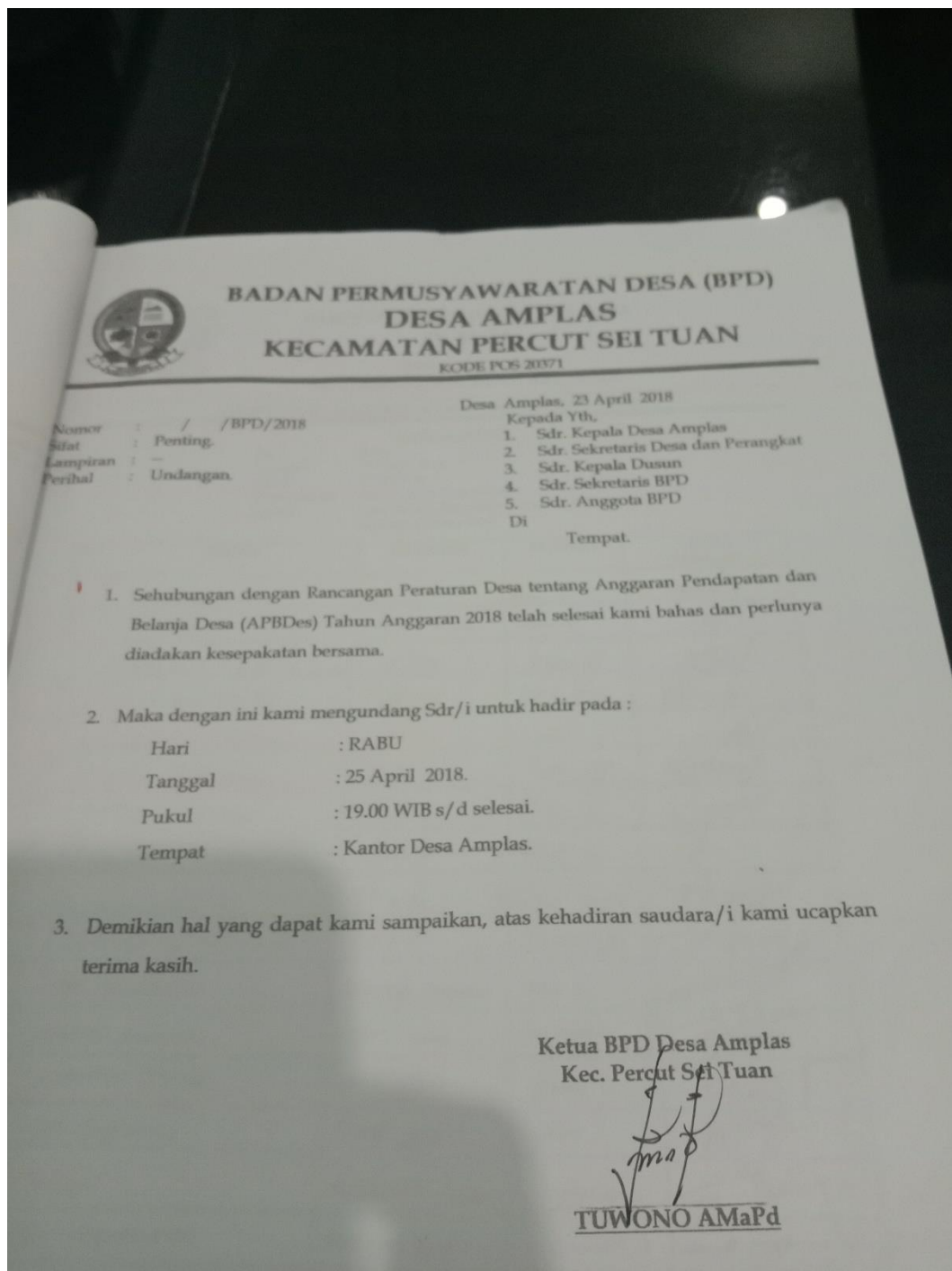
(Wawancara Bendahara Desa)



(Wawancara Kaur Umum dan Perencanaan)

Lampiran 5

Undangan Rapat



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
DESA AMPLAS

Amplas, 13 April 2018

Nomor : 005/
 Sifat : Penting/Segera.
 Lamp.
 Perihal : Pengesahan Rancangan Peraturan Desa
 Tentang APBDesa Tahun-2018.

Kepada Yth :
 1. Sdr. Ketua/Anggota BPD Desa Amplas
 2. Sdr. Ketua/Anggota LKMD Desa Amplas
 3. Sdr. Ketua/Anggota Tim Penggerak PKK
 4. Sdr. Kepala Dusun-I 5/d IV Desa Amplas
 5. Sdr.....

di- Tempat.

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami undang saudara yang tersebut diatas untuk dapat hadir pada :


Hari / Tanggal : Senin, 16 April 2018
 Pukul : 19.00 Wib.
 Tempat : Kantor Desa Amplas

Guna Pengesahan Peraturan Desa Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018.

Ketua BPD/LKMD/Tim Penggerak PKK agar hadir dan menghadirkan anggotanya masing-masing, dan khusus Kepala Dusun agar hadir membawa Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pengurus RT/RW. dari Dusun masing-masing.

Demikian Undangan ini kami sampaikan untuk dilaksanakan, dan hadir tepat pada Waktunya.

Kepala Desa Amplas
 Kec. Percut Sei Tuan

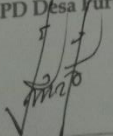

 EDI PURWANTO

Tembusan :
 1. Bapak Camat Percut Sei Tuan
 2. Bertinggal

Notulen Rapat

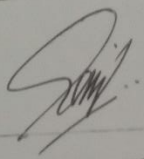
NOTULEN RAPAT	
Tanggal rapat/pertemuan	: 25 April 2018.
Waktu/jam mulai rapat	: 19.00 WIB
Tempat rapat/pertemuan	: Kantor Desa Amplas.
Materi rapat/pertemuan	: Kesepakatan Bersama
Uraian jalannya rapat/pertemuan	:
- Pimpinan rapat	: TUWONO AMaPd (Ketua BPD).
- Jumlah yang diundang	: 26 (Dua Puluh Enam) orang.
- Jumlah yang hadir	: 21 (Dua Puluh Satu) orang.
- Jumlah yang tidak hadir	: —
- Susunan acara	: 1. Pembukaan oleh protokol. 2. Bimbingan dan arahan dari Kepala Desa 3. Bimbingan dan arahan dari Ketua BPD. 4. Pembahasan materi. 5. Do'a. 6. Penutup.
- Uraian jalannya rapat	: aman dan tertib.
- Keputusan	: Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa
✓ Telah disepakati bersama	
- Penutup	: Do'a.

Disahkan oleh
Pimpinan Rapat
Ketua BPD Desa Purwodadi



TUWONO AMaPd

Pembuat notulen rapat



IASMANI

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 16 April 2018
 Waktu/Jam Mulai Rapat : Mulai Pukul 19.00 Wib s/d selesai.
 Tempat Rapat : Kantor Desa Amplas.
 Materi Rapat : Rapat APBDesa.

Uraian Jalannya Rapat/Pertemuan :

Pimpinan Rapat : Kepala Desa Amplas.

Susunan Acara :

1. Pembukaan Oleh Protokol.
2. Bimbingan dan arahan dari Kepala Desa.
3. Bimbingan dan arahan dari Sekretaris Desa.

Uraian jalannya rapat :

1. Kepala Desa membuka rapat dan menjelaskan pokok permasalahan yang dibahas pada rapat ini.
2. Sekretaris Desa melanjutkan dengan membacakan Peraturan Bupati tentang Anggaran ADD, Bagi Hasil Pajak dan APBN.
3. Tanya jawab oleh peserta rapat.

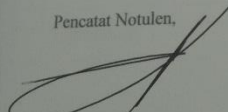
Keputusan :

1. Anggaran dibagi untuk 4, bagian tersebut antara lain :
 - a. Biaya Operasional Pembangunan Desa.
 - b. Biaya Pembangunan / Infrastruktur.
 - c. Biaya Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Biaya Pembinaan Kemasyarakatan.
2. Anggaran APBN, diperuntukan Pembangunan Infrastruktur.

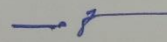
Penutup :

Doa dipimpin oleh Tokoh Ketua LKMD (Ustad SUHERMAN AKHMAL).

Pencatat Notulen,


 Adi Siswanto

Disahkan Oleh :
 Pimpinan Rapat
 Kepala Desa Amplas


 EDI PURWAN PO

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2018

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPD-DESA)
TAHUN 2018

DESA : AMPLAS
KECAMATAN : PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN : DELI SERDANG
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan	1.	Penghasilan Tetap	Desa									TPK Bidang
	Pemerintahan		- Kepala Desa (1 org)	Sda	1 org	Meningkatkan	12 bln	32.400.000	ADD	V			Pendes
	Desa		- Sekretaris Desa			Kinerja							
			- Kaur Pemerintahan (1 org)	Sda	1 org	Sda	12 bln	19.200.000	ADD	V			Pendes
			- Kaur Umum (1 org)	Sda	1 org	Sda	12 bln	19.200.000	ADD	V			Pendes
			- Kaur Pembangunan (1 org)	Sda	1 org	Sda	12 bln	19.200.000	ADD	V			Pendes
			- Bendahara Desa (1 org)	Sda	1 org	Sda	12 bln	19.200.000	ADD	V			Pendes
			- Kepala Dusun (5 org)	Sda	9 org	sda	12 bln	54.000.000	ADD	V			Pendes
		2.	Tunjangan	Desa									
			- Kepala Desa (1 org)	Sda	1 org	Meningkatkan	12 bln	6.000.000	ADD	V			Pendes
			- Sekretaris Desa			Kinerja							
			- Kaur Pemerintahan (1 org)	Sda	1 org	Sda	12 bln	3.600.000	ADD	V			Pendes
			- Kaur Umum (1 org)	Sda	1 org	Sda	12 bln	3.600.000	ADD	V			Pendes
			- Kaur Pembangunan (1 org)	Sda	1 org	Sda	12 bln	3.600.000	ADD	V			Pendes
			- Bendahara Desa (1 org)	Sda	1 org	Sda	12 bln	3.600.000	ADD	V			Pendes
			- Kepala Dusun (5 org)	Sda	9 org	sda	12 bln	18.000.000	ADD	V			Pendes
		3	Tunjangan BPD	Desa									
			- Ketua (1 org)	Sda	1 org	Meningkatkan	12 bln	6.000.000	BHPR	V			Pendes
			- Wakil Ketua (1 org)	Sda	1 org	Kinerja	12 bln	4.800.000	BHPR	V			Pendes
			- Sekretaris (1 org)	Sda	1 org	Sda	12 bln	4.800.000	BHPR	V			Pendes

	- Anggota (8 org)	Sda	8 org	sda	12 bin	33.600.000	BHPR	V		
4	Tunjangan BPJS									
	Ketenagakerjaan	Desa								
	- Kepala Desa	Sda	1 org	Meningkatkan	6 bin	973.440	ADD	V		Pendes
	- Sekretaris Desa	Sda		Kinerja						
	- Kaur Pemerintahan	Sda	1 org	Sda	6 bin	841.170	ADD	V		Pendes
	- Kaur Umum	Sda	1 org	Sda	6 bin	841.170	ADD	V		Pendes
	- Kaur Pembangunan	Sda	1 org	Sda	6 bin	841.170	ADD	V		Pendes
	- Bendahara Desa	Sda	1 org	Sda	6 bin	841.170	ADD	V		Pendes
5	Operasional	Desa		Memperkirakan		92.003.880	ADD	V		Pendes
	Perkantoran			Kegiatan						Pendes
	- Belanja Barang dan Jasa	Sda		Sda	12 bin	51.943.880	ADD	V		Pendes
	- Belanja Modal	Sda		Sda	12 bin	40.060.000	ADD	V		Pendes
6	Operasional BPD	Sda		Sda	12 bin	1.115.916	Silva ADD 2017	V		Pendes
7	Peningkatan Kapasitas Kades	Sda	1 org	Sda	7 hari	10.000.000	ADD	V		Pendes
8	Penguatan SDM Peng.BPD	Sda	1 org	Sda	1 hari	4.500.000	ADD	V		Pendes
9	Penguatan SDM Sekdes	Sda	1 org	Sda	1 hari	4.500.000	Silva ADD 2017	V		Pendes
10	Penguatan SDM Perangkat Desa	Sda	4 org	Sda	3 hari	8.000.000	ADD	V		Pendes
11	Penguatan SDM Kepala Dusun	Sda	9 org	Sda	1 hari	1.000.000	ADD	V		Pendes
12	Pendataan Desa Berdasarkan Kewenangan Lokal Desa									Pendes
	Penyusunan Data Dasar	Informasi								
	Keluarga (DOK)	data	1 paket	sda	12 bin	17.450.000	ADD	V		Pendes
13	- Pembangunan Sarana	Sda		Sda						Pendes
	Dan Prasarana Kantor Desa	sda		sda	1 bin	27.040.000	ADD	V		Pendes
	- Rehab Pagar Kantor Desa	Sda	1s	sda	8 hari	22.900.000	ADD	V		Pendes
	- Pengecatan Kantor	Sda	1s	Sda	3 hari	4.140.000	ADD	V		Pendes
Jumlah Per Bidang 1						420.747.916	ADD+ Silva ADD 2017	V		Pendes

II	Pembangunan										TPK Bidang	
	Desa	1.	Pemb. Jl. Biola Dsn IIIA	Dsn IIIA	396 x 3 M	Transportasi	60 hari	240.830.000	APBN	V	Pemba-	
		2	Pemb. Gg. Sakura 6	Dsn I	118 x 1,5 M	Transportasi	30 hari	55.005.000	APBN	V		
		3	Pemb. Gg. Mawar 5	Dsn I	206 x 1,5 M	Transportasi	60 hari	78.195.000	APBN	V	Sda	
		4.	Pemb. Gg. Agrek 9B	Dsn I	45 x 1 M	Transportasi	30 hari	14.337.500	APBN	V	sda	
		5.	Pemb. Gg. Agrek 9A	Dsn I	82 x 1,5 M	Transportasi	60 hari	37.600.000	APBN	V	Sda	
		6	Pemb. Balai Umum	Dsn III	32 x 12 M	Lancar	30 hari	91.021.400	APBN	V	Sda	
		7	Draenase Gg. Sakura 5	Dsn I	183x0,3x0,5	Lancar	30 hari	61.030.600	APBN	V	Sda	
		8	Pemb. Balai Umum	Dsn II	45 x 13 M	Lancar	30 hari	122.848.800	APBN	V	Sda	
		9	Draenase dsn IV	Dsn IV	265x0,6x0,5	Lancar	30 hari	119.087.400	SilvaAPB N+BHPD+ APBN	V	Sda	
Jumlah Per Bidang 2								619.955.700	SilvaAPB N+BHPD+ APBN	V	Sda	
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		1	Pembinaan PKK / Pokja I	Desa	La	Meningkatkan SDM	12 bin	5.930.000	APBN	V	TPK Bidang
			2	Pembinaan/Pelatihan PKK/ Pokja II	Desa	40 org	sda	1 kali	2.920.000	APBN	V	Kemasya-
			3	Pembinaan/Pelatihan PKK/ Pokja II	Desa	40 org	Sda	1 kali	1.920.000	APBN	V	rakatan
			4	Pembinaan LKMD	Desa	La	Sda	12 bin	3.000.000	APBN	V	Sda
			5	Penyuluhan Pen. Narkoba	Desa	60 org	Sda	1 kali	3.896.000	APBN	V	Sda
			6	Perayaan MTQ Tingkat Desa	Desa	La	Sylar Agama	12 bin	10.000.000	APBN	V	Sda
			7	Pengadaan Alat Olah Raga	Desa	La	Meningkat	1 hari	6.600.000	APBN	V	sda
Jumlah Per Bidang 3								34.288.000	APBN	V	sda	
IV	Bidang Pember Masyarakat		1	Pembinaan PKK/Pokja IV, Insentif Kader & PMT Posyandu Balita	Dusun	La	Meningkatkan	12 bin	13.560.000	APBN	V	Sda
			2	Ongkos Angkut Rastra	Desa	1 org	Memperancar Distribusi	12 bin	10.800.000	APBN	V	sda
Jumlah Per Bidang 4								24.360.000	APBN	V		
V	Pembiayaan		JUMLAH TOTAL						1.299.329.616			
Mengetahui KORAL & DESA												Desa Ampas 10 Maret 2022

Mengetahui
KEPALA DESA AMPLAS

EDI PURWANTO

Desa Amplas, 19 Maret 2016
Disusun Oleh:
Tim Penyusun RKP Desa AMPLAS

Lampiran 6

Dokumen APBDesa 2018

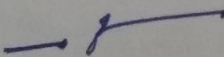
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	PENDAPATAN		
1 1	Pendapatan Asli Desa		
1 1 1	Hasil Usaha Desa		
1 1 1 1	- Badan Usaha Milik Desa		
1 1 1 2	- Tanah Kas Desa		
1 1 2	Asset Desa		
1 1 2 1	- Tambatan Perahu		
1 1 2 2	- Pasar Desa		
1 1 2 3	- Pemandian Umum		
1 1 2 4	- Jaringan Irigasi		
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 1 4 1	- Bunga Bank		
1 2	Pendapatan Transfer	1.207.674.000	
1 2 1	Dana Desa	707.857.000	APBN
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	79.892.000	BHPR
1 2 3	Alokasi Dana Desa	419.925.000	ADD
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten		
1 3	Pendapatan Lain lain		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.207.674.000	
2	BELANJA	1.299.329.616	
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	420.747.916	ADD = 365.932.000 BHPR = 49.200.000 Silpa = 5.615.916
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	255.138.120	BPD = 21.600.000
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
2 1 1 1 1	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	163.200.000	ADD
2 1 1 1 2	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	38.400.000	ADD
2 1 1 1 3	- Tunjangan BPD	49.200.000	BHPD
2 1 1 1 4	- Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan	4.338.120	ADD
2 1 1 1 5	- Tunjangan BPJS Kesehatan		
2 1 2	Operasional Perkantoran	92.003.880	ADD
2 1 2 2	- Belanja Barang dan Jasa	51.943.880	
2 1 2 3	- Belanja Modal	40.060.000	ADD
2 1 3	Operasional BPD	1.115.916	Silva ADD 2017
2 1 3 2	Belanja Barang dan Jasa	1.115.916	Silva ADD 2017
2 1 4	Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	10.000.000	ADD
2 1 4 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	28.000.000
2 1 5	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	18.000.000	Silva ADD + ADD
2 1 5 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	ADD
2 1 5 2 1	- Penguatan SDM Pengurus BPD (1 org)	4.500.000	ADD
2 1 5 2 2	- Penguatan SDM Sekretaris Desa (1 org)	4.500.000	Silpa ADD 2017
2 1 5 2 3	- Penguatan SDM Perangkat Desa (4 org)	8.000.000	ADD
2 1 5 2 4	- Penguatan SDM Kepala Dusun (5 org)	1.000.000	ADD

2	1	16	2	Penyusunan Profil Desa	17.450.000	ADD
2	1	16	2	-Cetak Buku DOK	8.510.000	
				-Honor Tenaga Pencatat DOK	4.600.000	
				-Honor Tenaga Intai DOK	3.450.000	
				-Pelatihan Honor DOK	890.000	
2	1	13	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	27.040.000	ADD
2	1	13	2	Belanja Modal		
				- Pembangunan Kanopi teras	22.900.000	
				- Pengecatan Kantor Desa	4.140.000	
2	2			Bidang Pembangunan Desa	619.955.700	APBN = 693.181.000 BHPR = 30.682.000 ADD = 10.033.000 SRPA = 86.039.700
2	2	1		Pengadaan ,Pembangunan,Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman		
2	2	2		Pengadaan,Pembangunan,Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transporasi Jalan Pemukiman : Paving Block	496.826.000	APBN
2	2	2		1. Pemasangan Paving Block Jl. Biola Dusun III A Selambo (3,0 x 396 m)	240.830.000	APBN
2	2	2	2	Belanja Modal	44.120.000	
				A. Upah Kerja :	900.000	
				B. Honor TPK	300.000	
				C. Tenaga Teknis	1.000.000	
				D. Kereta Sorong	194.510.000	
				E. Material		
2	2	2		2 Pemasangan Paving Block Gg. Sakura 6 Dusun I (2,0 x 118 m)	55.065.000	APBN
2	2	2	2	Belanja Modal	9.440.000	
				A. Upah Kerja :	900.000	
				B. Honor TPK	300.000	
				C. Tenaga Teknis	1.000.000	
				D. Kereta Sorong	43.365.000	
				E. Material		
2	2	2		3. Pemasangan Paving Block Gg. Mawar 5 Dusun I (1,5 x 206 m)	78.195.000	APBN
2	2	2	2	Belanja Modal	13.120.000	
				A. Upah Kerja :	900.000	
				B. Honor TPK	300.000	
				C. Tenaga Teknis	1.000.000	
				D. Kereta Sorong	62.875.000	
				E. Material		
2	2	2		4. Pemasangan Paving Block Gg. Anggrek 9B Dusun I (1,0 x 45 m)	14.337.500	APBN
2	2	2	2	Belanja Modal	2.200.000	
				A. Upah Kerja :	900.000	
				B. Honor TPK	300.000	
				C. Tenaga Teknis	0	
				D. Kereta Sorong	10.937.500	
				E. Material		
2	2	2		5. Pemasangan Paving Block Gg. Anggrek 9A Dusun I (1,9 x 82 m)	37.600.000	APBN
2	2	2	2	Belanja Modal	6.240.000	
				A. Upah Kerja :	900.000	
				B. Honor TPK	300.000	
				C. Tenaga Teknis	1.000.000	
				D. Kereta Sorong	29.160.000	
				E. Material		

2	2	2	6. Peningkatan Saluran Drainase Gg. Sakura 5 Dsn I (183 x 0,3 x 0,5 m)	61.030.600	APBN
2	2	2	Belanja Modal		
			A. Upah Kerja :	15.200.000	
			B. Honor TPK	0	
			C. Tenaga Teknis	500.000	
			D. Alat	3.750.000	
			E. Material	41.580.600	
2	2	2	7. Peningkatan Saluran Drainase Dsn IV (285 x 0,6 x 0,5 m)	119.087.400	ADD+BHPD+Silva APBN
2	2	2	Belanja Modal		
			A. Upah Kerja :	38.160.000	
			B. Honor TPK	1.400.000	
			E. Material	79.527.400	
2	2	2	8. Pembangunan Balai Umum Dusun III Uk. 32x12 m	91.021.400	APBN
2	2	2	Belanja Modal		
			A. Upah Kerja :	19.840.000	
			B. Honor TPK	1.400.000	
			C. Tenaga Teknis	500.000	
			D. Alat	2.000.000	
			E. Material	68.681.400	
2	2	2	8. Pembangunan Balai Umum Dusun III Uk. 45 m x 14 m	122.848.800	APBN
2	2	2	Belanja Modal		
			A. Upah Kerja :	27.000.000	
			B. Honor TPK	1.400.000	
			C. Tenaga Teknis	500.000	
			D. Alat	2.500.000	
			E. Material	92.848.800	
2	2	3	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi		
2	2	4	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi		
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	34.266.000	APBN = 14.666.000 ADD = 19.600.000
2	3	1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LKMD, PKK, Karang Taruna)	17.666.000	APBN = 14.666.000 ADD = 3.000.000
			Belanja Barang dan Jasa		
			1. Pembinaan TP PKK Pokja I	5.930.000	APBN 1.927.100
			2. Pembinaan/pelatihan Pembuatan ACRILIE	2.920.000	APBN
			3. Pembinaan/Pelatihan Pembuatan Raket UBI	1.920.000	APBN
			4. Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba	3.896.000	APBN
			5. Pembinaan LKMD	3.000.000	ADD
2	3	3	Kegiatan Melestarikan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM) : Kegiatan Gotong royong rutin		
2	3	5	Penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar Keagamaan Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	ADD
			1. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Desa	10.000.000	
2	3	7	Kegiatan Seni Budaya dan Olah Raga Belanja Modal	6.600.000	ADD
			- Pengadaan Tenis Meja	6.600.000	
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	24.360.000	ADD = 24.360.000
2	4	1	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	13.560.000	ADD
2	4	1	Penyediaan Makanan Sehat Untuk Peningkatan Gizi Bagi Balita dan Anak Sekolah dan Insentif Kader	13.560.000	ADD
2	4	17	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Bantuan Insentif Guru PAUD		

2	4	20	Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Sesuai dengan Prioritas, Potensi dan Nilai Kearifan Lokal		
			- Penyusunan Profil Desa / Input Data Dasar Keluarga		
2	4	12	Ongkos Angkut Raskin	10.800.000	ADD
2	5		Bidang Tak Terduga		
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2 Belanja Barang dan Jasa:		
			JUMLAH BELANJA	1.299.329.616	
			Defisit	91.655.916	
3			PEMBIAYAAN	91.655.916	
3	1		Penerimaan Pembiayaan	91.655.916	
3	1	1	SILPA	91.655.916	Silpa APBN+Silpa ADD
3	1	1	1 Pelampauan PADesa	0	
3	1	1	2 Penghematan Belanja	0	
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	2	1 Piutang		
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	91.655.916	
			JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (RP)		
3	2		Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2	Penyertaan Modal Desa		
3	2	2	1 Penyertaan Modal untuk BUMDes		
3	2	2	2 Penyertaan Modal untuk UED-SP		
3	2	2	3 Penyertaan Modal untuk UP2K-PKK		0
			JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Rp)		
			PEMBIAYAAN NETTO (Rp)	(91.655.916)	
			SILPA AKHIR (Rp)		

Ditetapkan di : Desa Amplas
 Pada tanggal : April 2018
 KEPALA DESA AMPLAS


 EDI PURWANTO

Lampiran 7

Rencana Anggaran Biaya 2018

Bidang : Pembinaan Masyarakat

Kegiatan : Pembinaan PKK

Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Pendanaan :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Sumber Dana
Kesekretariatan				5.930.000	APBN
1. Pembuatan Papan Data	14	Pcs	250.000	3.500.000	
2. Perjalanan Dinas					
-Ketua PKK	12	Kali	60.000	720.000	
-Sekretaris PKK	12	Kali	50.000	600.000	
-Bendahara PKK	12	Kali	50.000	600.000	
Sub Total				5.420.000	
Kegiatan/Pokja I					
1. Gotong Royong (1 Kali)					
-Nasi	30	Bungkus	15.000	450.000	
-Aqua	2	Kotak	30.000	60.000	
Sub Total				510.000	
Jumlah Total				5.930.000	ABPN

Bidang : Pembinaan Kemasyarakatan
 Kegiatan : Pembinaan PKK/Pokja II
 Waktu Pelaksanaan : 1 Hari
 : Pelatihan Pembuatan ACRILIE
 Pendanaan :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Sumber Dana
Belanja Barang dan Jasa					APBN
1. Honor Totor 2 Orang	2	Hari	200.000	400.000	
Sub Total				400.000	
2. Beli Bahan	1	Ps	1.500.000	1.500.000	
Sub Total				1.500.000	
3. Konsumsi					
-Nasi Bungkus	40	Bungkus	15.000	600.000	
-Snack	40	Bungkus	7.500	300.000	
-Aqua Gelas	2	Kotak	30.000	60.000	
-Aqua Botol	20	Botol	3.000	60.000	
Sub Total				1.020.000	
Jumlah				2.920.000	

Bidang : Pembinaan Kemasyarakatan
 Kegiatan : Pembinaan PKK/Pokja II
 Waktu Pelaksanaan : 1 Hari
 : Pelatihan Pembuatan Roket ubi
 Pendanaan :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Sumber Dana
Belanja barang dan Jasa					APBN
1. Honor Totor 2 Orang	2	Hari	200.000	400.000	
Sub Total				400.000	

2. Beli Bahan	1	Ps	500.000	500.000	
Sub Total				500.000	
3. Konsumsi					
-Nasi Bungkus	40	Bungkus	15.000	600.000	
-Snack	40	Bungkus	7.500	300.000	
-Aqua Gelas	2	Kotak	30.000	60.000	
-Aqua Botol	20	Btl	3.000	60.000	
Sub Total				1.020.000	
Jumlah Total				1.920.000	

Bidang : Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan :- Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan (LKMD, PKK)
 -Penyuluhan Penanggulangan Narkoba

Waktu Pelaksanaan :1 Hari

Pendanaan :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Sumber Dana
Belanja Barang dan jasa					APBN
1. Honor Narasumber (2 Orang x 3 Jampel)	6	Jampel	75.000	450.000	
2. Konsumsi					
-Nasi	70	Kotak	15.000	1.050.000	
Snack	140	Kotak	7.500	1.050.000	
-Buah Pisang	2	Sisir	15.000	30.000	
-Buah Jeruk	2	Kg	18.000	36.000	
3. ATK					
-Buku Tulis	70	Buah	5.000	350.000	
-Pulpen	70	Buah	4.000	280.000	
4. Sound System	1	Set	500.000	500.000	
5. Dokumentasi	20	Buah	2.500	50.000	
6. Spanduk	1	Buah	100.000	100.000	
Jumlah Total				3.896.000	

Bidang :Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan :Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan LKMD

Waktu Pelaksanaan :12 Bulan

Pendanaan :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Sumber Dana
Kesekretariatan				750.000	ADD
1. Rapat Koordinasi					
-Rapat Pembahasan Pelaksanaan Pembangunan (2 Kali)					
➤ Snack	40	Kotak	7.500	300.000	
Sub Total				300.000	
2. Perjalanan Dinas					
➤ Ketua LKMD	4	Hari	50.000	200.000	
➤ Bendahara LKMD	1	Hari	50.000	50.000	
➤ Sekretaris LKMD	2	Hari	50.000	100.000	
➤ Anggota LKMD	2	Hari	50.000	100.000	
Sub Total				450.000	
Kegiatan					
1. Gotong Royong 3 Kali					
➤ Nasi	140	Bungkus	15.000	2.100.000	
➤ Aqua Gelas	6	Kotak	25.000	150.000	
Sub Total				2.250.000	
Jumlah Total				3.000.000	

Bidang : Pembinaan Kemasyarakatan
 Kegiatan : PenyelenggaraannKegiatan MTQ Tingkat Desa
 Waktu Pelaksanaan : 2 Hari

Pendanaan :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Sumber Dana
Belanja Brang dan jasa					
-Pembelian Trophy	12	Set	200.000	2.400.000	
-Honor Juri	12	Orang	200.000	2.400.000	
-Konsumsi Snack	300	Kotak	7.500	2.250.000	
-Konsumsi Makan Panitia/Juri Hari H	50	Kotak	15.000	750.000	
-Pembuatan Piagam	36	Buah	50.000	1.800.000	
-Dokumentasi	1	Ls	200.000	200.000	
-Dekorasi	1	Ls	200.000	200.000	
Jumlah Total				10.000.000	ADD

Bidang : Pembinaan Kemasyarakatan
 Kegiatan : Pengadaan Srana /Prasarana Olahraga
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Pendanaan :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Sumber Dana
Belanja Barang dan jasa					
-Net/Jaring Bola Volly	3	Buah	300.000	900.000	
-Net/Jaring Badminton	1	Buah	300.000	300.000	
-Bola Volly	6	Buah	300.000	1.800.000	
Bola Kaki	16	Buah	200.000	1.200.000	
-Raket	2	Buah	500.000	1.000.000	
-Cat Lap PB Pelangi	10	Kg	80.000	800.000	

-Bola Badminton	6	Slochk	100.000	600.000	
Jumlah total				6.600.000	ADD

Bidang : Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan :- Pembinaan PKK/Pokja IV
 -Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu

Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Pendanaan :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Sumber Dana
Belanja Barang dan Jasa					
-Insentif Kader (18 Org x 12 Bln)	216	Bulan	50.000	10.800.000	
-Insentif PPKBD	12	Bulan	50.000	600.000	
Sub Total				11.400.000	
-Konsumsi					
➤ Telur Ayam Ras	540	Butir	2.000	1.080.000	
➤ Roti Biskuit	540	Butir	2.000	1.080.000	
Sub Total				2.160.000	
Jumlah Total				13.560.000	ADD

Bidang : Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan : Ongkos Angkut raskin

Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Pendanaan :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Sumber Dana
Belanja Barng dan Jasa					ADD
-Upah Angkut (900.000 x 12 Kali))	12	Kali	900.000	10.800.000	
Jumlah				10.800.000	

Lampiran 8

Dokumen Rekening Koran Desa 2018

Kepada Yth :
109 02.04.018194-0
KANTOR DESA AMPLAS
JALAN PROTOKOL DUSUN I DESA

REKENING KORAN TABUNGAN
PERIODE : 01 Januari 2018 s.d 15 Februari 2018

Hal 1 dari 1

Tgl Tx	Time Stamp	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi	Saldo Akhir	OP-ID	SPV	Lok Tx
02/01/18	30/12/17	000	SALDO AWAL BULAN	00000000		7.230,838			
05/01/18	05/01/18	201	penghutan angg add	11640007	0 CR	7,230,838	00000	00000	109
15/01/18	16/01/18	199	ADM Jan, 2018	ADM-0000	89,028,118 CR	96,256,954	b1164	u1318	109
29/01/18	29/01/18	299	TUNJ BPD JAN 2018	AUDB-1802	5,000 DB	96,251,954	dco03	dco03	109
29/01/18	29/01/18	299	BTL SILTAP & TUNJ	AUDB-1802	4,100,000 CR	100,351,954	u1802	u1802	109
31/01/18	01/02/18	299	BNG Jan, 2018	BNG-0000	16,800,000 CR	117,151,954	u1802	u1802	109
31/01/18	01/02/18	199	PJK Jan, 2018	PJK-0000	138,192 CR	117,290,146	dco03	dco03	109
01/02/18	31/01/18	000	SALDO AWAL BULAN	00000000	27,399 DB	117,262,747	dco03	dco03	109
01/02/18	01/02/18	101	siltap	32910005	0 CR	117,262,747	00000	00000	109
01/02/18	01/02/18	101	tunjangan bpd	32910006	16,800,000 DB	100,462,747	b3291	b1164	109
15/02/18	15/02/18	199	ADM Feb, 2018	ADM-0000	4,100,000 DB	96,362,747	b3291		109
					5,000 DB	96,357,747	dco03	dco03	109
Total Mutasi DB :					20,937,399				
Total Mutasi CR :					110,064,308				

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal : 16-October-2018

Dia : Cetak Rekening Koran
Tgl. Cetak : 15-02-2018
Tgl. Cetak : 16-10-2018 07:50:47
Petugas : YOGIE ERLANGGA

KANTOR DESA AMPLAS
JALAN PROTOKOL DUSUN I DESA

REKENING KORAN

NO. REKENING : 10802040181949
MATA UANG : IDR - INDONESIA RUPIAH
NPWP : 300669009125000
PERIODE : 15/02/2018 s.d 30/09/2018

No.	Tgl. Transaksi	No. Anmp	Kode TX	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo K	U	Saldo L
SALDO AWAL							96,357,747.00	K	
1	27/02/2018	G000096311	299	Gaji Bruto-2018-02-27-106-00009631-000009631	15,800,000.00		113,157,747.00	K	u2406 106
2	27/02/2018	G000096312	299	Gaji Bruto-2018-02-27-106-00009631-000009631	4,100,000.00		117,257,747.00	K	u2406 106
3	28/02/2018	BNGT0003620	200	BNG TAB 2 2018		155,662.00	117,414,409.00	K	s9990 109
4	28/02/2018	PJKT0028006	199	PJK TAB 2 2018	31,333.00		117,383,076.00	K	s9999 109
5	01/03/2018	b231600081	101	slitup/februari 2018	16,800,000.00		100,583,076.00	K	b2316 109
6	01/03/2018	b231600082	101	slitup BPD	4,100,000.00		96,483,076.00	K	b2316 109
7	15/03/2018	ADMT0057837	199	BIAYA ADM 3 2018	5,000.00		96,478,076.00	K	s9999 109
8	29/03/2018	G000096311	299	Gaji Bruto-2018-03-29-106-00009631-000009631	15,800,000.00		113,278,076.00	K	u1802 106
9	29/03/2018	G000096312	299	Gaji Bruto-2018-03-29-106-00009631-000009631	4,100,000.00		117,378,076.00	K	u1802 106
10	29/03/2018	b277800122	101	PENARIKAN TUNAI	16,800,000.00		100,578,076.00	K	b2778 109
11	29/03/2018	b277800123	101	PENARIKAN TUNAI	4,100,000.00		96,478,076.00	K	b2778 109
12	31/03/2018	BNGT0006750	200	BNG TAB 3 2018		184,357.00	96,662,433.00	K	s9999 109
13	31/03/2018	PJKT0031118	199	PJK TAB 3 2018	38,872.00		96,623,561.00	K	s9999 109
14	15/04/2018	ADMT0058816	125	BIAYA ADM 4 2018	5,000.00		96,620,561.00	K	s9999 109
15	27/04/2018	G000096311	299	Gaji Bruto-2018-04-27-106-00009631-000009631	15,800,000.00		113,420,561.00	K	u2406 106
16	27/04/2018	G000096312	299	Gaji Bruto-2018-04-27-106-00009631-000009631	4,100,000.00		117,520,561.00	K	u2406 106
17	30/04/2018	b116400068	101	lampiran bpd	4,100,000.00		113,420,561.00	K	b1164 109
18	30/04/2018	b116400069	101	slitup	16,800,000.00		96,620,561.00	K	b1164 109
19	30/04/2018	BNGT0009403	228	BNG TAB 4 2018		187,374.00	96,807,935.00	K	s9990 109
20	30/04/2018	PJKT0038082	199	PJK TAB 4 2018	37,475.00		96,770,460.00	K	s9999 109
21	15/05/2018	ADMT0058829	125	BIAYA ADM 5 2018	5,000.00		96,765,460.00	K	s9999 109
22	23/05/2018	G000096311	299	DO ADD DBH THP 1-2018-05-23-106-00009631-000009631		290,961,500.00	387,747,060.00	K	u1336 106
23	28/05/2018	G000096311	299	SIL LAP DAN TUNJ BMD MEJ 2018-2018-05-28-106-00009631-000009631		20,800,000.00	408,547,060.00	K	u2406 106
24	31/05/2018	b277800049	101	slitup dan lampiran kores dan pengantar desa	16,800,000.00		391,747,060.00	K	b2778 109

100000407010949
: IDR - INDOONESIAN RUPIAH
: 30066000125000
: 15/02/2018 s.d 30/09/2018

REKENING KORAN

						Hal 2 dari 3	
No.	Tgl. Transaksi	No. Arsip	Kode TX	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo
							FW K
							Uraian
							Cob Lnk
SALDO AWAL							96,327,747.00 K
26	31/05/2018	b277800050	101	lanjutan bpd	4,100,000.00		367,747,060.00 K b2778
26	31/05/2018	BNGT0009462	228	BNG TAB 5 2018		368,884.00	368,145,924.00 K s0999
27	31/05/2018	PJKT0037436	199	PJK TAB 5 2018	79,773.00		368,066,151.00 K s0999
28	07/06/2018	b329100130	101	add.bhqpapin	280,801,800.00		87,084,351.00 K b3291
29	07/06/2018	b329100131	101	add.bhqpapin	96,158,954.00		927,587.00 K b3291
30	15/06/2018	ADM70067905	125	BIAYA ADM 6 2018	5,000.00		922,587.00 K s0999
31	23/06/2018	0000006311	298	DO ADO DSH 119* 8-2018-09-22-106-000000631-000000631		283,142,880.00	284,065,387.00 K u2406
32	26/06/2018	0000006311	298	SLTAP DAN TUNJ BPD JUNE 2018-2018-06-26-106-000000631-000000631		20,900,000.00	304,965,387.00 K u2406
33	26/06/2018	b116400041	101	slap, lanjutan kebet & perangkai desa	18,800,000.00		286,165,387.00 K b1164
34	26/06/2018	b116400042	101	lanjutan bpd	4,100,000.00		284,065,387.00 K b1164
35	30/06/2018	BNGT0009582	228	BNG TAB 6 2018		368,603.00	284,434,000.00 K s0999
36	30/06/2018	PJKT0041072	199	PJK TAB 6 2018	73,608.00		284,360,392.00 K s0999
37	15/07/2018	ADM70067905	125	BIAYA ADM 7 2018	5,000.00		284,355,392.00 K s0999
38	30/07/2018	0000006312	298	SLTAP JULI 2018-2018-07-30-106-000000631-000000631		18,800,000.00	301,155,392.00 K u2406
39	30/07/2018	0000006313	298	SLTAP JULI 2018-2018-07-30-106-000000631-000000631		4,180,000.00	305,335,392.00 K u2406
40	31/07/2018	BNGT0009591	228	BNG TAB 7 2018		567,282.00	305,922,684.00 K s0999
41	31/07/2018	PJKT0041262	199	PJK TAB 7 2018	133,458.00		305,789,225.00 K s0999
42	03/08/2018	b116400131	101	slap	18,800,000.00		286,989,225.00 K b1164
43	03/08/2018	b116400132	101	lanjutan bpd	4,100,000.00		284,889,225.00 K b1164
44	05/08/2018	b221600110	101	dana desa	283,142,800.00		1,746,426.00 K b2316
45	15/08/2018	ADM70067904	125	BIAYA ADM 8 2018	5,000.00		1,741,425.00 K s0999
46	31/08/2018	0000006311	298	ADO 119* II 40%-2018-08-31-106-000000631-000000631		18,800,000.00	18,541,425.00 K u2406
47	31/08/2018	0000006312	298	ADO THP II 40%-2018-08-31-106-000000631-000000631		4,100,000.00	22,641,425.00 K u2406
48	31/08/2018	BNGT0009739	228	BNG TAB 8 2018		177,352.00	22,518,777.00 K s0999
49	31/08/2018	PJKT0008060	199	PJK TAB 8 2018	36,168.00		22,783,619.00 K s0999
50	04/09/2018	b160700090	101	slap	18,800,000.00		5,983,619.00 K b1607
51	04/09/2018	b160700091	101	lanjutan BPD	4,100,000.00		1,883,619.00 K b1607
52	15/09/2018	ADM70067907	125	BIAYA ADM 9 2018	5,000.00		1,878,619.00 K s0999
53	27/09/2018	0000006311	298	SLTAP DAN TUNJ SEP1 2018-2018-09-27-106-000000631-000000631		18,800,000.00	18,678,619.00 K u2406
54	27/09/2018	0000006312	298	SLTAP DAN TUNJ, SEPT 2018-2018-09-27-106-000000631-000000631		4,100,000.00	22,778,619.00 K u2406

0000040181949
 IDR - INDOONESIAN RUPIAH
 : 300660009125000
 : 15/02/2018 s.d 30/09/2018

REKENING KORAN

Hal 3 dari 3

No	Tgl. Transaksi	No. Arsip	Kode TX	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo K	Usrid	Cab	Lnk
SALDO AWAL							96,357,747.00	K		
55	30/09/2018	BNGT000625	228	BNG TAB 9 2018	8,523.00	22,785,542.00	K 9999	100		
56	30/09/2018	PJKT0005148	199	PJKTAB 8 2018	1,311.00	22,785,631.00	K 9999	100		
SALDO AWAL							96,357,747.00	K		
MUTASI DB							817,045,343.00			
MUTASI KR							743,473,227.00			
SALDO AKHIR							22,785,631.00	K		

TEMBUNG
 Tgl: 16 Oktober 2018 09:04:32

Printed By: LARABATI HARAHAP

KANTOR DESA AMPLAS
JALAN PROTOKOL DUSUN I DESA

REKENING KORAN

NO. REKENING : 10902040181949
MATA UANG : IDR - INDONESIA RUPIAH
NPWP : 300669009125000
PERIODE : 01/01/2018 s.d 31/12/2018

Hal 1 dari 2

No.	Tgl. Transaksi	No. Anslp	Kode TX	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo K	Uslrld	Cob Lnk
SALDO AWAL							22,765,631.00	K	
1	03/10/2018	b277000110	101	siltap	16,800,000.00		5,965,631.00	K b2778	109
2	03/10/2018	b277000111	101	tunjangan bpd	4,100,000.00		1,865,631.00	K b2778	109
3	15/10/2018	ADMT0057336	125	BIAYA ADM 10 2018	5,000.00		1,860,631.00	K s8899	109
4	31/10/2018	BNGT0008562	228	BNG TAB 10 2018		4,105.00	1,864,736.00	K s9090	109
5	31/10/2018	PJKT0035262	199	PJK TAB 10 2018	375.00		1,864,361.00	K s9099	109
6	02/11/2018	G000096311	299	ADD THP II 40%-2018-11-02-106-00009631-0000009631		16,800,000.00	18,684,361.00	K u2406	106
7	02/11/2018	G000096312	299	ADD THP II 40%-2018-11-02-106-00009631-0000009631		1,100,000.00	22,784,361.00	K u2406	106
8	13/11/2018	b329100037	101	tunjangan bpd	4,100,000.00		18,584,361.00	K b3291	109
9	13/11/2018	b329100038	101	siltap	16,800,000.00		1,884,361.00	K b3291	109
10	15/11/2018	ADMT0057268	125	BIAYA ADM 11 2018	5,000.00		1,879,361.00	K s8899	109
11	29/11/2018	G000096311	299	ADD THP II 40%-2018-11-29-106-00009631-0000009631		88,606,800.00	101,486,161.00	K u2406	106
12	29/11/2018	G000096312	299	DD THP III 40%-2018-11-29-106-00009631-0000009631		283,142,800.00	384,628,961.00	K u2406	106
13	30/11/2018	G000096311	299	SILTAP NOV 2018-2018-11-30-106-00009631-0000009631		16,800,000.00	401,428,961.00	K u2406	106
14	30/11/2018	G000096312	299	TUNJ DPD NOV 2018-2018-11-30-106-00009631-0000009631		4,100,000.00	405,528,961.00	K u2406	106
15	30/11/2018	BNGT0008351	228	BNG TAB 11 2018		71,136.00	406,600,097.00	K s9090	109
16	30/11/2018	PJKT0035383	199	PJK TAB 11 2018	13,968.00		405,586,131.00	K s9090	109
17	03/12/2018	b160700070	101	SILTAP	16,800,000.00		388,786,131.00	K b1607	109
18	03/12/2018	b160700071	101	tunjangan bpd	4,100,000.00		384,686,131.00	K b1607	109
19	06/12/2018	b160700060	101	dana desa	283,142,800.00		101,543,331.00	K b1607	109
20	05/12/2018	b160700070	101	ADD dan BHP	99,808,800.00		1,308,531.00	K b1607	109
21	15/12/2018	ADMT0056930	125	BIAYA ADM 12 2018	5,000.00		1,303,531.00	K s8899	109
22	18/12/2018	G000096311	299	SILTAP DES 2018-2018-12-18-106-00009631-0000009631		16,800,000.00	18,731,531.00	K u2406	106
23	18/12/2018	G000096312	299	TUNJ. DPD DES 2018-2018-12-18-106-00009631-0000009631		4,100,000.00	22,831,531.00	K u2406	106
24	20/12/2018	b277000110	101	siltap	16,800,000.00		6,031,531.00	K b2778	109

Lampiran 9

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa 2018

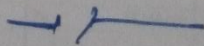
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN DESA AMPLAS TAHUN ANGGARAN 2018				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	4.501.338,00	6.986.429,00	2.485.091,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	4.501.338,00	6.986.429,00	2.485.091,00
1.2.	Pendapatan Transfer	1.207.674.000,00	1.207.674.000,00	0,00
1.2.1.	Dana Desa	707.857.000,00	707.857.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	79.892.000,00	79.892.000,00	0,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	419.925.000,00	419.925.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.212.175.338,00	1.214.660.429,00	2.485.091,00
2.	BELANJA			
2.21	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	425.249.254,00	422.749.254,00	2.500.000,00
2.21.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	255.138.120,00	255.138.120,00	0,00
2.21.1.1.	Belanja Pegawai	255.138.120,00	255.138.120,00	0,00
2.21.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00
2.21.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00
2.21.1.1.03.	Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
2.21.1.1.04.	Tunjangan BPJS ketenagakerjaan	4.338.120,00	4.338.120,00	0,00
2.21.2	Operasional perkantoran	92.003.880,00	90.503.880,00	1.500.000,00
2.21.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.943.880,00	50.443.880,00	1.500.000,00
2.21.2.2.01.	Honor Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan D	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.21.2.2.02.	Alat Tulis Kantor	6.773.880,00	6.773.880,00	0,00
2.21.2.2.03.	Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.21.2.2.04.	Cetak dan Penggandaan	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00
2.21.2.2.07.	Pakaian Dinas dan atribut	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.21.2.2.08.	Alat dan bahan kebersihan	980.000,00	980.000,00	0,00
2.21.2.2.09.	Perjalanan Dinas dalam Daerah (ke Kecamatan)	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00
2.21.2.2.10.	Perjalanan Dinas dalam Daerah (ke Kabupaten)	660.000,00	660.000,00	0,00
2.21.2.2.12.	Pemeliharaan aset desa / barang inventaris	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.21.2.2.13.	Air, listrik, telepon dan Internet	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.21.2.2.14.	Biaya rapat desa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
2.21.2.2.15.	Biaya operasional petugas RASTRA	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
2.21.2.2.16.	Biaya pajak kendaraan dinas roda dua tahun berjalan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.21.2.2.17.	Honor TPK	900.000,00	900.000,00	0,00
2.21.2.2.20.	Honor Tim Penyusun RPJMdes dan RKPdes	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.21.2.3.	Belanja Modal	40.060.000,00	40.060.000,00	0,00

	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
	2	3	4	5
2.21.2.3.14	Pengadaan Peralatan Kantor	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00
2.21.2.3.15	Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
2.21.2.3.16	Pengadaan Komputer/Laptop	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
2.21.2.3.51	Pengadaan Meubelair	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.21.3	Operasional BPD	1.115.916,00	1.115.916,00	0,00
2.21.3.2	Belanja Barang dan Jasa	1.115.916,00	1.115.916,00	0,00
2.21.3.2.02	Alat Tulis Kantor	170.916,00	170.916,00	0,00
2.21.3.2.04	Cetak dan Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00
2.21.3.2.09	Perjalanan Dinas dalam Daerah (ke Kecamatan)	450.000,00	450.000,00	0,00
2.21.3.2.14	Biaya rapat desa	450.000,00	450.000,00	0,00
2.21.4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dan	28.000.000,00	27.000.000,00	1.000.000,00
2.21.4.2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	27.000.000,00	1.000.000,00
2.21.4.2.11	Perjalanan dinas luar daerah (tiket pesawat,transport lol	28.000.000,00	27.000.000,00	1.000.000,00
2.21.7	Pendataan Desa Berdasarkan Kewenangan Lokal Berska	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00
2.21.7.2	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00
2.21.7.2.01	Honor Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Di	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00
2.21.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	31.541.338,00	31.541.338,00	0,00
2.21.12.3	Belanja Modal	31.541.338,00	31.541.338,00	0,00
2.21.12.3.26	Pengadaan Bangunan Lainnya	31.541.338,00	31.541.338,00	0,00
2.22	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	819.955.700,00	819.955.700,00	0,00
2.22.4	Drainase	180.118.000,00	180.118.000,00	0,00
2.22.4.3	Belanja Modal	180.118.000,00	180.118.000,00	0,00
2.22.4.3.29	Pengadaan Jaringan Air	180.118.000,00	180.118.000,00	0,00
2.22.6	Jalan pemukiman	425.967.500,00	425.967.500,00	0,00
2.22.6.3	Belanja Modal	425.967.500,00	425.967.500,00	0,00
2.22.6.3.27	Pengadaan Jalan Desa	425.967.500,00	425.967.500,00	0,00
2.22.35	Balai Pelatihan / Kegiatan belajar masyarakat	213.870.200,00	213.870.200,00	0,00
2.22.35.3	Belanja Modal	213.870.200,00	213.870.200,00	0,00
2.22.35.3.26	Pengadaan Bangunan Lainnya	213.870.200,00	213.870.200,00	0,00
2.23	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	34.266.000,00	30.370.000,00	3.896.000,00
2.23.1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LKMD, PKK, Ka	17.666.000,00	13.770.000,00	3.896.000,00
2.23.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.666.000,00	13.770.000,00	3.896.000,00
2.23.1.2.25	Penyuluhan	3.896.000,00	0,00	3.896.000,00
2.23.1.2.27	Bimbingan Teknis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.23.1.2.28	Kursus ketrampilan	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
2.23.1.2.29	Pelatihan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
2.23.1.2.39	Insentif kader Posyandu	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00
2.23.4	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.23.4.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
	2	3	4	5
2.23.4.2.45.	Perayaan Hari Besar Keagamaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.23.7	Seni Budaya dan Olah Raga	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
2.23.7.3.	Belanja Modal	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
2.23.7.3.52.	Pengadaan alat/sarana olahraga	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
2.24	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	24.360.000,00	24.360.000,00	0,00
2.24.1	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00
2.24.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00
2.24.1.2.39.	Insentif kader Posyandu	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00
2.24.27	Ongkos angkut	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.24.27.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.24.27.2.15.	Biaya operasional petugas RASTRA	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.303.830.954,00	1.297.434.954,00	6.396.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(91.655.616,00)	(82.774.525,00)	(8.881.091,00)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	91.655.616,00	91.655.616,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	91.655.616,00	91.655.616,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	91.655.616,00	91.655.616,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	8.881.091,00	(8.881.091,00)

Amplas, 31 Desember 2018

Kepala Desa Amplas


 EDI PURWANTO

Lampiran 10

Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Pemerintah Desa Amplas
Tahun 2018

Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)	Ket.
1				2	3			4
1				PENDAPATAN	1.214.660.429	1.214.660.429	(2.485.091)	ADD/DD/BHPRD
1	1			Pendapatan Asli Desa	4.501.338	6.986.429		
1	1	4		Lain-Lain Pendapatan Asli desa yg Sah				
				➤ Bunga Bank	4.501.338	6.986.429		
1	2			Pendapatan Transfer	1.207.674.000	1.207.674.000		
1	2	1		Dana Desa	707.857.000	707.857.000		DD
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota	79.892.000	79.892.000		BHPRD
1	2	3		Alokasi Dana Desa	419.925.000	419.925.000		ADD
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				

1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
JUMLAH PENDAPATAN					1.212.175.338	1.214.660.429		
2				BELANJA	1.303.830.954	1.297.434.954	6.396.000	
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	425.249.254	422.749.254	2.500.000	
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	255.138.120	255.138.120		
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	163.200.000	163.200.000		
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	38.400.000	38.400.000		
				- Tunjangan BPD	49.200.000	49.200.000		
				-Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan	4.338.120	4.338.120		
2	1	2		Operasional Perkantoran	92.003.880	90.503.880	1.500.000	ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	51.943.880	50.443.880	1.500.000	
				- Alat Tulis Kantor	6.773.880	6.773.880		
				- Benda POS	1.500.000	1.500.000		
				-Cetak dan Penggandaan	8.280.000	8.280.000		
				- Pakaian Dinas dan Atribut	4.800.000	4.800.000		
				- Perjalanan Dinas	3.500.000	3.500.000		
				- Honor Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa	4.500.000	4.500.000		

				- Honor Tim Penyusunan RKPDDes	2.500.000	2.500.000		
				- Pembayaran Air, Listrik, Telepon dan internet	9.000.000	9.000.000		
				- Alat dan kebersihan Kantor	980.000	980.000		
				-Biaya Pemeliharaan Aset desa/Barang inventaris	2.400.000	2.400.000		
				- Biaya Rapat desa	3.150.000	3.150.000		
				-Biaya Operasional Petugas Raskin	2.160.000	2.160.000		
				-Biaya Pajak Kendaraan Roda dua	1.500.000		1.500.000	
				-Honor TPK	900.000	90.000		
2	1	2	3	Belanja Modal	40.060.000	40.060.000		ADD
				- Pengadaan Peralatan Kantor	40.060.000	40.060.000		
2	1	3		Operasional BPD	1.115.916	1.115.916		Silva ADD
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK	170.916	170.916		
				- Cetakan danPenggandaan	45.000	45.000		
				- Biaya Rapat	450.000	450.000		
				-Perjalanan Dinas	450.000	450.000		
2	1	4		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	28.000.000	27.000.000	1.000.000	ADD
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000	10.000.000		
				- Penyuluhan SDM Kepela Dusun	1.000.000		1.000.000	

				- Bimbingan Teknis SDM Sekretaris Desa dan BPD	9.000.000	9.000.000		
				-Pelatihan SDM Perangkat Desa	8.000.000	8.000.000		
2	1	7		Pendekatan Desa Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Profil, Monografi, Pendataan Desa Lainnya)	17.450.000	17.450.000		
2	1	7	2	Belanja Brang dan Jasa	17.450.000	17.450.000		
				-Cetak dan Penggandaan	16.560.000	16.560.000		
				- Pelatihan	890.000	890.000		
2	1	13		Pembangunan Sara dan Prasarana	31.541.338	31.541.338		ADD
2	1	13	2	Belanja Modal	31.541.338	31.541.338		
				- Pengadaan Gedung kantor/Tempat Kerja	22.900.000			
				- Pengecatan Kantor Desa	4.140.000	4.140.000		
				-Pintu Pagar Kantor	4.501.338	4.501.338		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		819.955.700	819.955.700	ADD, DD,B HPR D,SIL VA
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana				

				Lingkungan Permukiman				
2	2	6		Jalan Permukiman	819.955.700	819.955.700		DD
2	2	6	3	Belanja Modal				
				-Draenase Gg.Sakura Dsn I	61.030.600	61.030.600		DD
				- Paving Block Dsn III.A	240.830.000	240.830.000		DD
				- Paving Block Gg.Sakura 6	55.005.000	55.005.000		DD
				- Paving Block Gg.Mawar 5	78.195.000	78.195.000		DD
				- Paving Block Gg. Anggrek 9B	14.337.500	14.337.500		DD
				- Pavling Block Gg.Anggrek 9A	37.600.000	37.600.000		DD
				- Balai Umum Dsn II	122.848.800	122.848.800		DD
				-Balai Umum Dsn III	91.021.400	91.021.400		DD
				- Draenase G Dsn IV	119.087.400	119.087.400		DD
				Pengadaan Pembangunan, Pengembangan, dan pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan				
2	2	33		Buku Peralatan Belajar PAUD				
2	2	33	3	Belanja Modal				
				- Alat praga Edukatif dan Buku Belajar PAUD				
2	3			Bidang Pembinaan Masyarakat	34.266.000	30.370.000	3.896.000	DD
2	3	1		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LKMD,PKK, Karang Taruna)				

				- LKMD	3.000.000	3.000.000		DD
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Sosialisasi Narkoba				
				-Penyuluhan Kamtibmas				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
2	3	1		PKK	14.666.000	14.666.000		DD
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Pembinaan TP PKK Pokja I	5.930.000	5.930.000		
				- Pelatihan Pembuatan Accrile	2.920.000	2.920.000		
				- Pelatihan Pembuatan Roket Ubi	1.920.000	1.920.000		
				- Penyuluhan Narkoba	3.896.000	3.896.000		
2	3	1		Karang Taruna				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Pelatihan Karangan Bunga				
				Kegiatan Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat desa (BBGRM)				
2	3	3		Pengelolaan Posyandu				
2	3	3	2	Belanja Barang dan jasa				

				- Honor Insentif Kader				
				- Makanan Tambahan				
2	3	5		Penyelenggaraan Hari Besar keagamaan				
2	3	5		Peringatan 1 Muharam 1440 H				
2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor dan Insentif Juri				
				- Perlengkapan				
2	3	6		Penyelenggaraan Hari Besar Nasional				
				- Peringatan HUT RI 17 Agustus 2018				
2	3	6	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Perlengkapan Kegiatan Hari Besar Nasional				
2	3	7		Kegiatan Sosial Budaya dan Olahraga				ADD
				- Pengadaan Tenis Meja	6.600.000	6.600.000		
				Pengadaan Fasilitas Sarana Olahraga				
2	3	7	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Perlombaan MTQ Desa	10.000.000	10.000.000		
2	3			Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	24.360.000	24.360.000		ADD

2	3	1		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan					ADD
				- Insentif	11.400.000	11.400.000			
				- Makanan Tambahan	2.160.000	2.160.000			
				Ongkos Angkut Rastra	10.800.000	10.800.000			
				- Upah Angkut (Truck)					
2	5	1		Bidang Tak terduga					SILV A/PAD
				Belanja Barang dan Jasa					
				- Bantuan Bencana Alam					
Jumlah Belanja					1.303.830.954	1.297.434.954	6.396.000		
Surplus/Defisit					(91.655.616)	(82.774.525)	(8.881.091)		
3				PEMBIAYAAN					
3	1			Penerimaan Pembiayaan					
3	1	1		SILPA	91.655.616	91.655.616			
3	1	1	1	Perlampauan PADesa					
3	1	1	2	Penghematan Belanja					
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan					
3	1	2	1	Piutang					
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan					
JUMLAH					91.655.616	91.655.616			
3	2			Pengeluaran Pembiayaan					
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan					

3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
3	2	2	1	Penyertaan Modal Untuk BUMDes				
3	2	2	2	Penyertaan Modal Untuk UED-SP				
3	2	2	3	Penyertaan Modal Untuk UP2K-PKK				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan								
Pembiayaan NETTO					91.655.616			
SILVA Akhir							6.396.000	

Amplas, 04 Februari 2019
Kepala desa Amplas
Kec. Percut Sei Tuan

TTD
(Edi Purwanto)

Lampiran 11

**LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Tahun N (2018) (Tahun Periode Pelaporan)	Tahun N-1 (2017) (Tahun Sebelumnya)
I. Aset Desa		
A. Aset Lancar		
1. Kas Desa		
a. Uang Kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa	Rp. 2.027.770.000	Rp. 7.230.838
2. Piutang		
a. Piutang		
b. Piutang Sewa Tanah		
c. Piutang sewa Gedung		
d. Dst...		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. Dst		
Jumlah Aset Lancar	Rp. 2.027.770.000	Rp. 7.230.838
B. Aset Tidak Lancar		
1. Investasi Permanen		
-Penyertaan Modal		
2. Aset Tetap		
a. Tanah	Rp. 1.530.000.000	Rp. 2.467.523.000
-Tanah Kantor Desa	Rp. 1.130.250.000	Rp. 980.523.000
-Tanah Kas Desa	Rp. 250.000.000	Rp. 185.000.000
-Tanah/Lapangan Sepak Bola	Rp. 150.000.000	Rp. 1.302.000.000
b. Peralatan dan mesin	Rp. 22.500.000	Rp. 200.936.960
c. Gedung dan bangunan	Rp. 70.000.000	Rp. 55.000.000
d. Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp. 670.000.000	Rp. 875.000.000
3. Dana Cadangan		
-Dana Cadangan		
4. Aset Tidak Lancar Lainnya		
Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp. 2.362.750.000	Rp. 3.653.459.960

Jumlah Aset (A+B)	Rp.2.363.777.770	Rp. 3.660.690.798
II. Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	Rp.
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	Rp.
Jumlah Kekayaan Bersih (I-II)	Rp. 2.364.777.770	Rp. 3.660.690.798

Daftar Hadir

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	P. H. GAOL	RW 02	Per I	
2	JAMALU	BPD	DSN I	
3	ADI SAPUTRA, P.	STAF DESA	DSN I	
4	K. Supriatna, P.	STAF DESA	DSN I	
5	L. Damatik	RT 04	DSN IV	
6	WAWAN	KADUS I	DSN I	
7	MISDI	RT 06	DSN I	
8	PERKANTO	LEMD	DSN I	
9	H. NAWALAH	KADUS II	DSN II	
10	AMAT, PURBA	RT 07	DSN I	
12	MURIC	- II -	DSN II	
13	NARIM TARISAN	B.P.D.	DSN III	
14	SURANTO, SYAURI	RT 04	DSN I	
15	M. AGUS	LEMD	DSN I	
16	KURNIA Sembung	KADUS B.	DSN II	
17	SUHERI	R.T. 03	DSN I	
18	M. Sani ASHINA	R.W. 02	DSN II	
19	BETTY S.	R.W. 010	DSN III	
20	R. B. HUTASOIT	R.W. 07	DSN III	
21	M. Sumpri	R.W. 01	DSN III	
22	HER TAMBIA	R.W. 05	DSN III	
23	TASICK	R.T. 08	DSN I	
24	MARLIN SARAGIH	LEMD	DSN IV	
25	HERMAN BARAS	R.T. DSN II	II	
26	HEPI TARKAN	B.P.D.	DSN II	
27	SAIMN	-	-	
28	WARNED	RT 02	- II -	
29	WAGMIN	R.W. 03	- II -	
30	WINARFO	L.K. 04	DSN I	
31	SUREDJI GINTING	BPD	DSN IV	
32	ADI SIKWANTO	SEKODAS	DSN I	
33	Monarto Tumenggung	P.D.	-	
34	M. K. RAZIK	P.D. P. S. Tuan	TEMbung	
35	Rahmatan Daulay	P.D. P. S. Tuan	Tembung	
36	SUMARJO	LEMD	DSN I	
37	Sutejo	Staf Desa	DSN I	
38	TUMARDI	RW 02	DSN I	
39	TUMONG	BPD	DSN I	
40				

Diketahui :
Sekretaris BPD

Lampiran 13

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**I. IDENTITAS DIRI**

1. Nama : Candra Suyatmiko
2. NIM : 52151007
3. Tempat/Tgl Lahir : Batu Lima, 12 Desember 1996
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jln. Gurila Gang Buyung Ali No. 8d

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 013843 Terusan Tengah Tahun 2009
2. Tamatan SMPN 1 Tinggi Raja Tahun 2012
3. Tamatan SMAN 3 Kisaran Tahun 2015
4. Tamatan UIN Sumatera Utara Tahun 2019

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Menteri Kaderisasi KSEI Universal Islamic Economic (UIE) UIN Sumatera Utara 2018.
2. Kabid. Kaderisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Kota Medan 2017-2018
3. Kadiv. Pariwisata dan Lingkungan Ikatan Komunika sin Mahasiswa Asahan 2018-2020.
4. Kadiv. Lingkungan Hidup Generasi Baru Indonesia (GenBI) UIN Sumatera Utara 2018-2019.